

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KECAMATAN BOROBUDUR**

#### **4.1 Komponen Pengembangan Pariwisata Berbasis 4A**

Analisis komponen pengembangan pariwisata dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 4A (*Attraction, Accessibility, Amenities, dan Ancillary*). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi aktual pengembangan pariwisata di Kecamatan Borobudur secara sistematis dan terstruktur. Pemilihan pendekatan 4A didasarkan pada pertimbangan bahwa keempat komponen tersebut merupakan elemen dasar dalam pengembangan destinasi wisata yang mampu menggambarkan kondisi fisik, fungsional, dan kelembagaan suatu kawasan wisata secara menyeluruh.

Dibandingkan dengan pendekatan 5A, 6A, atau 7A yang mencakup aspek lanjutan seperti *activity, available package, awareness, experience, dan engagement*, pendekatan 4A dinilai lebih relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis spasial dan perencanaan wilayah. Komponen *attraction, accessibility, amenities, dan ancillary* memiliki keterkaitan langsung dengan struktur ruang, jaringan transportasi, fasilitas pendukung, serta kelembagaan yang menjadi aspek utama dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata.

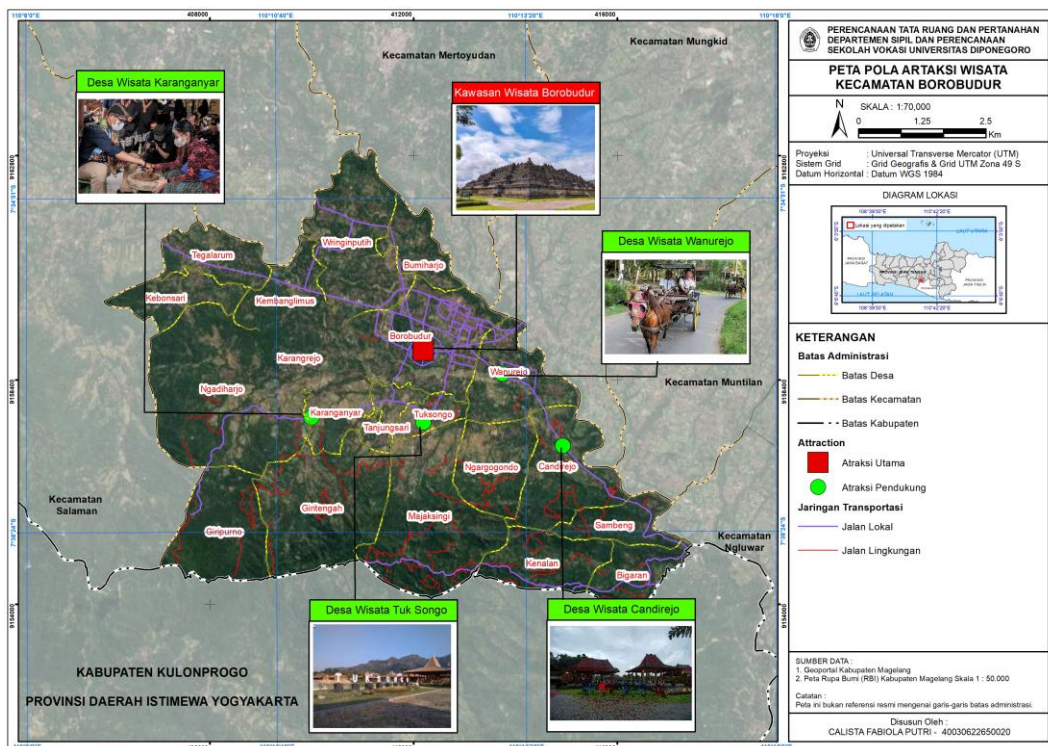
Keberhasilan suatu destinasi wisata ditentukan oleh keterpaduan keempat komponen tersebut yang saling berhubungan dalam membentuk sistem pariwisata yang berkelanjutan. Pendekatan ini juga diperkuat oleh (Pendarmawan et al., 2023) serta (Putri et al., 2024) yang menyatakan bahwa 4A merupakan elemen dasar dalam pengembangan destinasi wisata dan menjadi pendekatan yang paling umum digunakan dalam analisis kondisi dan pengelolaan destinasi pariwisata.

##### **4.1.1 Attraction**

*Attraction* merupakan komponen utama dalam sistem pengembangan pariwisata yang berfungsi sebagai faktor penarik utama kunjungan wisatawan ke suatu wilayah. Dalam pendekatan 4A, *attraction* tidak hanya mencakup objek wisata utama,

tetapi juga seluruh elemen yang memiliki nilai kunjungan baik berupa daya tarik budaya, alam, buatan, maupun aktivitas ekonomi dan sosial yang dapat membentuk pola pergerakan wisatawan dalam suatu kawasan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur attraction di Kecamatan Borobudur membentuk pola monosentris dengan Candi Borobudur sebagai pusat utama aktivitas wisata berskala internasional (ATR-01). Sebagai situs Warisan Dunia UNESCO, Candi Borobudur berperan sebagai growth pole yang membentuk orientasi kunjungan wisatawan serta memengaruhi perkembangan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan intensitas kunjungan wisata lebih terkonsentrasi pada kawasan inti dibandingkan desa-desa lainnya.



**Gambar 4. 1 Peta Pola Atraksi Wisata di Kecamatan Borobudur**

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Selain *attraction* utama tersebut, terdapat *attraction* pendukung yang tersebar pada beberapa desa wisata seperti Wanurejo, Candirejo, Karanganyar, Tuksongo, dan Giritengah yang menawarkan aktivitas wisata berbasis masyarakat berupa pertunjukan seni, kerajinan, kuliner lokal, paket wisata desa, serta pengalaman kehidupan perdesaan. Attraction pendukung ini berfungsi sebagai *secondary attraction* yang

mendukung diversifikasi produk wisata dan memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Borobudur.

Secara spasial, *attraction* pendukung tersebut cenderung berkembang mengikuti koridor jalan utama Borobudur–Salaman dan Borobudur–Yogyakarta, sehingga membentuk pola pengembangan wisata berbasis koridor (*tourism corridor development*). Kedekatan lokasi terhadap Candi Borobudur dan aksesibilitas yang baik menyebabkan desa-desa seperti Wanurejo dan Candirejo berkembang lebih cepat dibandingkan desa-desa pada kawasan Perbukitan Menoreh bagian selatan seperti Giripurno dan Ngadiharjo.

Keberadaan *attraction* pendukung tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan kawasan terhadap Candi Borobudur sebagai daya tarik utama. Aktivitas wisatawan masih didominasi oleh pola kunjungan satu tujuan (*single destination trip*) sehingga distribusi manfaat ekonomi belum tersebar secara merata ke seluruh desa di Kecamatan Borobudur. Kondisi ini menunjukkan adanya *single attraction system* yang berpotensi melemahkan diversifikasi ekonomi lokal dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Dari perspektif tata ruang, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan sistem jaringan destinasi melalui penguatan hubungan antar atraksi (*inter-destination linkage*), pengembangan koridor wisata, serta peningkatan fungsi desa wisata sebagai simpul aktivitas ekonomi lokal sehingga terbentuk distribusi kunjungan wisata yang lebih merata dan mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

Menurut Pendam et al., (2023), *attraction* atau daya tarik wisata merupakan komponen utama yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Daya tarik wisata dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu daya tarik alam (*natural resources*), daya tarik budaya (*cultural resources*), dan daya tarik buatan (*man-made attractions*). Ketiga jenis daya tarik tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan *attraction* di Kecamatan Borobudur berdasarkan karakteristik, fungsi, dan perannya dalam sistem pariwisata kawasan.

**Tabel 4. 1 Klasifikasi Attraction Kecamatan Borobudur**

| <b>Kategori Atraksi</b> | <b>Sub Kategori</b>                                | <b>Keterangan</b>                                                             | <b>Karakteristik</b>                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atraksi Utama           | Wisata Budaya<br>( <i>Cultural Resources</i> )     | Candi Borobudur                                                               | Skala internasional,<br>pusat orientasi<br>kunjungan wisata,<br>pembentuk struktur<br>wisata kawasan. |
| Atraksi Pendukung       | Wisata Budaya<br>( <i>Cultural Resources</i> )     | Wanurejo, Candirejo,<br>Karanganyar,<br>pertunjukan seni dan<br>tradisi lokal | Mendukung<br>diversifikasi wisata<br>berbasis budaya<br>masyarakat.                                   |
| Atraksi Pendukung       | Wisata Alam<br>( <i>Natural Resources</i> )        | Perbukitan Menoreh,<br>persawahan, panorama<br>perdesaan                      | Mendukung<br>pengembangan wisata<br>alam dan wisata minat<br>khusus.                                  |
| Atraksi Pendukung       | Wisata Buatan ( <i>Man-<br/>Made Attractions</i> ) | Balkondes, UMKM,<br>kerajinan, kuliner lokal                                  | Mendukung penguatan<br>ekonomi lokal dan<br>pengalaman wisata<br>berbasis masyarakat.                 |

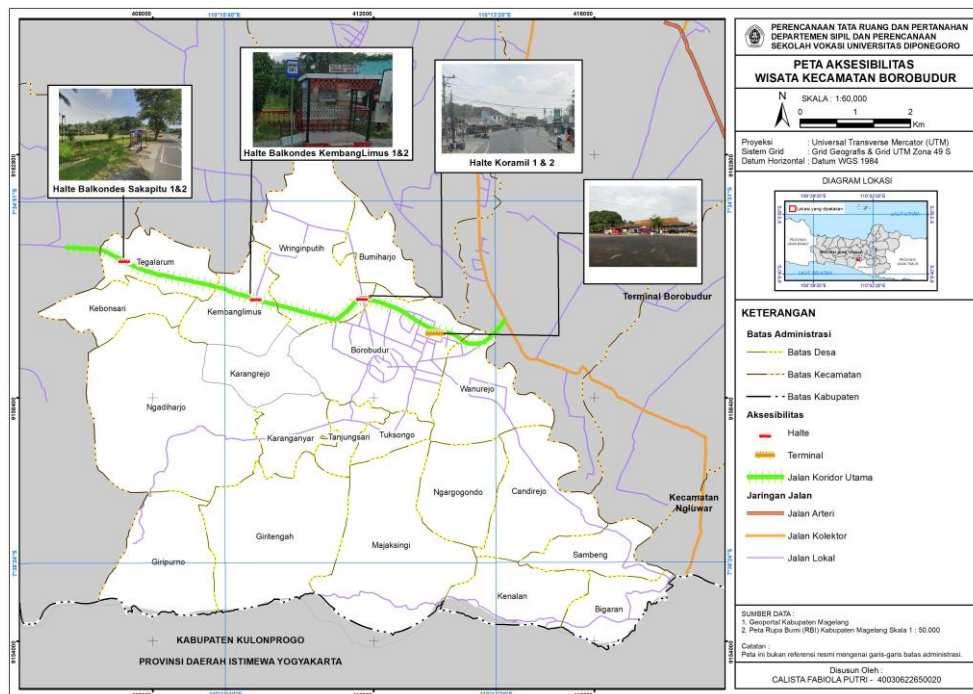
*Sumber : Analisis Penulis, 2026*

Berdasarkan Tabel 4.1, *attraction* di Kecamatan Borobudur didominasi oleh daya tarik budaya dengan Candi Borobudur sebagai atraksi utama yang memiliki skala pelayanan internasional dan berperan sebagai pusat orientasi kunjungan wisata. Sementara itu, *attraction* pendukung terdiri atas daya tarik budaya berupa desa wisata dan pertunjukan seni, daya tarik alam berupa lanskap Perbukitan Menoreh dan area persawahan, serta daya tarik buatan berupa UMKM, kerajinan, kuliner lokal, dan fasilitas wisata lainnya yang mendukung pengalaman wisata berbasis masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur *attraction* di Kecamatan Borobudur masih bersifat terpusat pada Candi Borobudur sehingga diperlukan penguatan *attraction* pendukung untuk meningkatkan persebaran kunjungan wisata dan pemerataan manfaat ekonomi antar wilayah.

#### 4.1.2 Accessibility

*Accessibility* menunjukkan pola yang tidak seimbang antara akses utama dan akses sekunder. Akses menuju Candi Borobudur sudah baik, namun konektivitas menuju desa wisata masih terbatas (ACC-01). Hal ini menyebabkan *tourist flow* bersifat linier dan tidak menyebar sehingga potensi ekonomi pada wilayah pinggiran belum berkembang secara optimal. Dalam pendekatan 4A, *accessibility* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan jaringan jalan, tetapi juga mencakup ketersediaan transportasi umum, halte, terminal, serta keterhubungan antar destinasi wisata dalam suatu sistem kawasan. Tingkat aksesibilitas yang baik berpengaruh terhadap mobilitas wisatawan, distribusi aktivitas ekonomi, serta pemerataan perkembangan pariwisata antar wilayah.

Selain jaringan jalan, aksesibilitas pada kawasan wisata juga dipengaruhi oleh ketersediaan moda transportasi umum dan fasilitas pendukung transportasi seperti halte dan terminal. Kecamatan Borobudur telah didukung oleh keberadaan Terminal Borobudur serta beberapa halte pada koridor utama seperti Halte Koramil, Halte Balkondes Kembanglimus, dan Halte Balkondes Sakapitu yang berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan menuju kawasan wisata Borobudur. Keberadaan fasilitas tersebut membentuk koridor utama pergerakan wisatawan yang menghubungkan kawasan Borobudur dengan Kota Magelang, Yogyakarta, dan Purworejo serta memengaruhi pola persebaran aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat di sekitarnya.



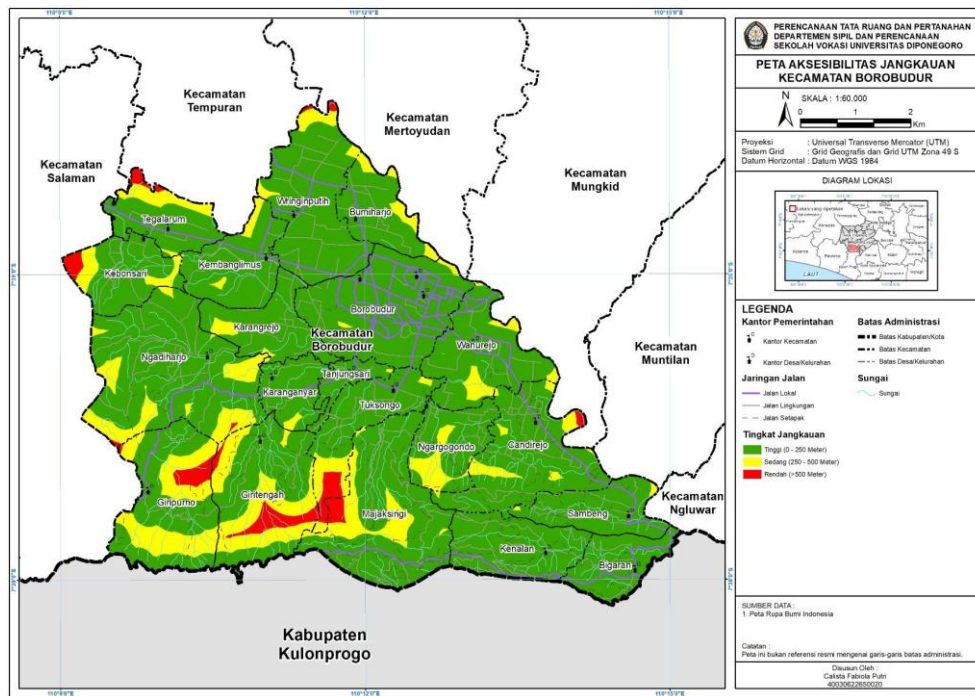
**Gambar 4. 2 Peta Aksesibilitas Wisata Kecamatan Borobudur**

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Berdasarkan hasil analisis, sistem aksesibilitas di Kecamatan Borobudur menunjukkan pola yang belum merata antara kawasan inti dan desa-desa penyangga. Kawasan sekitar Candi Borobudur memiliki tingkat aksesibilitas yang relatif tinggi karena didukung oleh keberadaan jalan kolektor, jalan lokal, Terminal Borobudur, serta beberapa titik halte seperti Halte Koramil dan Halte Balkondes Kembanglimus maupun Sakapitu. Infrastruktur tersebut membentuk koridor utama pergerakan wisatawan dan menjadi jalur utama distribusi aktivitas ekonomi pariwisata di Kecamatan Borobudur.

Analisis jangkauan aksesibilitas dilakukan menggunakan metode buffer terhadap jaringan jalan eksisting sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi tingkat kemudahan pencapaian suatu wilayah terhadap sistem transportasi kawasan. Penggunaan radius *buffer* 250 meter didasarkan pada asumsi jarak tempuh berjalan kaki sekitar 3–5 menit, sedangkan radius 500 meter merepresentasikan jangkauan berjalan kaki selama 5–10 menit yang masih dianggap nyaman bagi wisatawan dalam mengakses fasilitas dan destinasi wisata. Pendekatan ini umum digunakan dalam analisis aksesibilitas spasial untuk menilai tingkat keterjangkauan fasilitas terhadap pengguna kawasan.





**Gambar 4. 3 Peta Aksesibilitas Jangkauan Kecamatan Borobudur**

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*



**Gambar 4. 4 Kondisi Aksesibilitas dan Ruang Jalan Kecamatan Borobudur**

*Sumber : Observasi Lapangan, 2026*

Berdasarkan Peta Aksesibilitas Jangkauan Kecamatan Borobudur, sebagian besar wilayah penelitian didominasi oleh tingkat jangkauan tinggi yang ditunjukkan dengan warna hijau. Persebaran kawasan dengan aksesibilitas tinggi terlihat hampir merata pada bagian tengah hingga utara Kecamatan Borobudur, terutama pada Desa Borobudur, Wanurejo, Tuksongo, Kembanglimus, Wringinputih, Bumiharjo, Candirejo, Karanganyar, dan sebagian Ngargogondo. Dominasi tingkat jangkauan tinggi pada wilayah tersebut dipengaruhi oleh keberadaan jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan yang cukup berkembang serta kedekatan kawasan dengan jalur utama menuju Candi Borobudur.

Wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi berkembang lebih intensif sebagai pusat aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat. Kawasan tersebut memiliki perkembangan fasilitas wisata yang lebih lengkap seperti homestay, pusat kuliner, toko oleh-oleh, serta jasa wisata lainnya. Desa Borobudur sebagai kawasan inti wisata memiliki tingkat aksesibilitas paling baik karena berada pada pusat jaringan jalan kawasan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas wisata dan perdagangan terkonsentrasi pada wilayah sekitar Candi Borobudur. Selain Desa Borobudur, Desa Wanurejo dan Teksongo juga menunjukkan tingkat aksesibilitas tinggi karena berada pada koridor utama pergerakan wisatawan menuju kawasan wisata Borobudur. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tingkat aksesibilitas dengan perkembangan aktivitas ekonomi lokal, dimana desa-desa yang berada pada koridor utama wisata cenderung memiliki perkembangan UMKM, homestay, kuliner, dan jasa wisata yang lebih tinggi dibandingkan desa-desa pada kawasan perbukitan yang memiliki keterbatasan aksesibilitas.

Sementara itu, wilayah dengan tingkat jangkauan sedang tersebar pada beberapa bagian pinggiran kawasan, terutama pada wilayah transisi antara dataran dan perbukitan. Kawasan ini masih memiliki keterjangkauan yang cukup baik terhadap jaringan jalan, namun perkembangan aktivitas wisata dan fasilitas pendukung belum seintensif kawasan dengan aksesibilitas tinggi. Wilayah dengan tingkat jangkauan sedang umumnya berada pada sebagian Desa Ngadiharjo, Karangrejo, Candirejo, Sambeng, Giripurno, dan Majaksingi.

Adapun wilayah dengan tingkat jangkauan rendah terkonsentrasi pada beberapa kawasan perbukitan bagian selatan dan barat Kecamatan Borobudur, seperti sebagian wilayah Desa Giritengah, Giripurno, Majaksingi, serta beberapa area pinggiran kecamatan. Kawasan tersebut memiliki jarak yang lebih jauh terhadap jaringan jalan sehingga aksesibilitas wilayah relatif lebih terbatas dibandingkan kawasan lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh topografi berbukit dan kemiringan lereng yang cukup curam sehingga pembangunan jaringan jalan menjadi lebih sulit

**Tabel 4. 2 Kondisi Akses Menuju Destinasi Wisata Menurut Responden**

| <b>Jawaban</b> | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase</b> |
|----------------|------------------|-------------------|
| Sangat mudah   | 18               | 18%               |



| Jawaban      | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-----------|------------|
| Mudah        | 56        | 56%        |
| Sulit        | 22        | 22%        |
| Sangat sulit | 4         | 4%         |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Rendahnya tingkat jangkauan jalan pada kawasan perbukitan menyebabkan perkembangan aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat belum berkembang secara optimal. Meskipun memiliki potensi wisata alam dan panorama yang cukup besar, keterbatasan aksesibilitas menyebabkan mobilitas wisatawan menuju kawasan tersebut masih relatif rendah. Hasil kuesioner memperlihatkan bahwa 74 responden menilai akses menuju destinasi wisata mudah atau sangat mudah, tetapi 26 responden masih menilai sulit atau sangat sulit. Temuan ini menunjukkan bahwa akses utama sudah cukup baik, namun akses menuju beberapa desa dan kawasan perbukitan tetap memerlukan peningkatan.

Dari perspektif tata ruang, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan konektivitas antar destinasi wisata melalui peningkatan kualitas jaringan jalan lokal, pengembangan transportasi wisata penghubung, serta integrasi desa wisata ke dalam koridor wisata Borobudur guna mendukung pemerataan aktivitas wisata dan penguatan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

**Tabel 4. 3 Klasifikasi Jangkauan Jaringan Jalan Kecamatan Borobudur**

| Tingkat Jangkauan | Jarak terhadap Jaringan Jalan   | Sebaran Umum                                                                                                                                                            | Implikasi terhadap Pengembangan Wisata                                                               | Implikasi terhadap Ekonomi                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinggi            | 0–250 meter dari jaringan jalan | Mendominasi bagian tengah hingga utara, terutama Borobudur, Wanurejo, Teksongo, Kembanglimus, Wringinputih, Bumiharjo, Candirejo, Karanganyar, dan sebagian Ngargogondo | Mendukung konsentrasi aktivitas wisata, perdagangan-jasa, homestay, kuliner, dan mobilitas wisatawan | Mendukung perkembangan UMKM, homestay, kuliner, perdagangan dan jasa wisata karena berada pada koridor utama pergerakan wisatawan. |

| Tingkat Jangkauan | Jarak terhadap Jaringan Jalan     | Sebaran Umum                                                                                                                                              | Implikasi terhadap Pengembangan Wisata                                                                                               | Implikasi terhadap Ekonomi                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedang            | 250–500 meter dari jaringan jalan | Tersebar pada wilayah transisi antara dataran dan perbukitan, termasuk sebagian Ngadiharjo, Karangrejo, Candirejo, Sambeng, Giripurno, dan Majaksingi     | Masih dapat dikembangkan, tetapi memerlukan peningkatan konektivitas dan fasilitas pendukung                                         | Memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal namun memerlukan peningkatan konektivitas dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.                 |
| Rendah            | >500 meter dari jaringan jalan    | Terkonsentrasi pada beberapa kawasan perbukitan bagian selatan dan barat seperti sebagian Giritengah, Giripurno, Majaksingi, dan area pinggiran kecamatan | Aktivitas wisata massal terbatas; lebih sesuai untuk wisata alam, ekowisata, dan wisata pedesaan berbasis masyarakat secara terbatas | Manfaat ekonomi dari sektor pariwisata masih terbatas sehingga lebih sesuai dikembangkan untuk wisata alam, ekowisata, dan wisata berbasis masyarakat berskala kecil. |

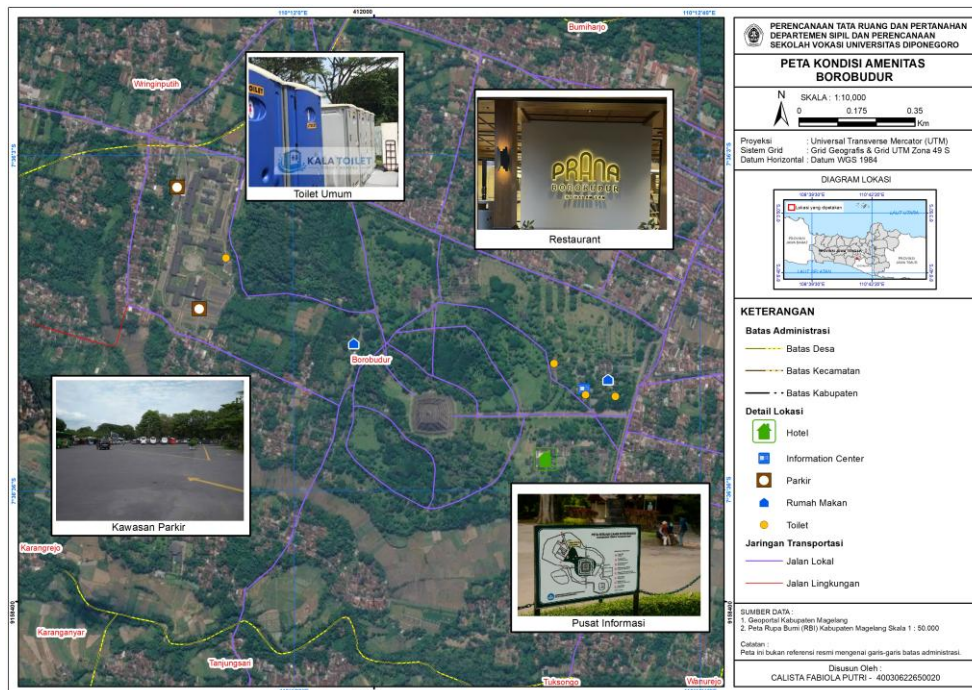
Sumber: Analisis Penulis, 2026

#### 4.1.3 Amenities

Amenitas merupakan komponen yang mencakup ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan wisata seperti akomodasi, rumah makan, area parkir, toilet umum, pusat informasi wisata, serta fasilitas pendukung lainnya yang menunjang kenyamanan wisatawan selama berada di suatu destinasi. Dalam sistem pariwisata, amenitas berperan penting dalam membentuk kualitas pengalaman wisatawan dan memengaruhi lama tinggal (*length of stay*) wisatawan pada suatu kawasan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa amenitas di Kecamatan Borobudur telah tersedia namun distribusinya masih belum merata (AMN-01). Sebagian besar fasilitas

wisata masih terkonsentrasi pada kawasan inti di sekitar Candi Borobudur, sedangkan beberapa desa wisata masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung seperti akomodasi, fasilitas publik, dan layanan wisata lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kualitas pengalaman wisata antara kawasan inti dan desa wisata penyangga. Wisatawan cenderung menghabiskan waktu lebih lama pada kawasan pusat karena ketersediaan fasilitas yang lebih lengkap, sementara desa wisata memiliki tingkat kunjungan yang relatif singkat akibat keterbatasan amenities.



**Gambar 4. 5 Peta Kondisi Amenitas Kecamatan Borobudur**

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Berdasarkan Peta Kondisi Amenitas Kecamatan Borobudur, fasilitas pendukung wisata seperti hotel, rumah makan, area parkir, toilet umum, dan pusat informasi wisata cenderung terkonsentrasi pada kawasan sekitar Candi Borobudur dan koridor utama wisata. Konsentrasi amenities tersebut menunjukkan bahwa kawasan inti memiliki tingkat pelayanan wisata yang lebih tinggi dibandingkan desa-desa wisata penyangga. Keberadaan amenities yang terpusat tersebut turut memengaruhi pola pergerakan wisatawan yang masih didominasi oleh kawasan inti sehingga distribusi manfaat ekonomi pariwisata belum sepenuhnya tersebar ke seluruh wilayah Kecamatan Borobudur.

**Tabel 4. 4 Kondisi Amenitas Kecamatan Borobudur**

| <b>Jenis Amenitas</b>  | <b>Kondisi Eksisting</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Dokumentasi</b>                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Parkir            | Area parkir terpusat tersedia di sekitar kawasan Candi Borobudur untuk mendukung mobilitas kendaraan wisatawan. Namun pada periode kunjungan tinggi masih ditemukan parkir di badan jalan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas kawasan. |    |
| Toilet Umum            | Toilet umum tersedia pada beberapa titik di sekitar kawasan inti Borobudur untuk memenuhi kebutuhan dasar wisatawan selama melakukan aktivitas wisata.                                                                                               |   |
| Rumah Makan dan UMKM   | Rumah makan dan UMKM terkonsentrasi pada kawasan inti wisata di sekitar Candi Borobudur dan koridor utama wisata.                                                                                                                                    |  |
| Pusat Informasi Wisata | Pusat informasi wisata tersedia pada kawasan inti untuk membantu orientasi wisatawan dan penyebaran informasi destinasi.                                                                                                                             |  |
| Akomodasi              | Hotel dan penginapan tersedia di sekitar kawasan Borobudur dan desa wisata tertentu seperti Wanurejo dan Candirejo.                                                                                                                                  |  |

Sumber: Analisis Penulis dan Observasi Lapangan, 2026

Berdasarkan hasil identifikasi amenitas, sebagian besar fasilitas pendukung wisata masih terkonsentrasi pada kawasan inti di sekitar Candi Borobudur. Sementara itu, desa wisata pada kawasan penyangga masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung wisata sehingga kualitas pelayanan wisata antar wilayah belum merata. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap lama tinggal wisatawan, dimana wisatawan cenderung memusatkan aktivitasnya pada kawasan inti yang memiliki amenitas lebih lengkap. Dari perspektif pariwisata berbasis masyarakat, pemerataan amenitas pada desa wisata diperlukan untuk mendukung penyebaran arus wisatawan, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat secara lebih merata.

#### **4.1.4 Ancillary**

*Ancillary* merupakan komponen yang menunjukkan dukungan kelembagaan dan sistem pengelolaan dalam pengembangan pariwisata, yang mencakup peran pemerintah daerah, Badan Otorita Borobudur (BOB), Dinas Pariwisata, pemerintah desa, Pokdarwis, serta pelaku usaha terkait. Komponen ini berperan dalam mendukung operasional, koordinasi, serta pengembangan kegiatan pariwisata di suatu kawasan. *Ancillary* menunjukkan bahwa struktur kelembagaan sudah terbentuk, namun belum berfungsi secara optimal dalam integrasi pengembangan pariwisata (ANC-01).

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur kelembagaan pariwisata di Kecamatan Borobudur telah terbentuk pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Kelembagaan tersebut mencakup instansi pemerintah sebagai perumus kebijakan, BOB sebagai pengelola kawasan strategis pariwisata, serta pemerintah desa dan Pokdarwis sebagai pelaksana kegiatan di tingkat lokal. Namun demikian, keterhubungan antar lembaga tersebut masih belum berjalan secara optimal. Koordinasi antar stakeholder masih cenderung bersifat sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi sehingga integrasi dalam pengembangan pariwisata belum sepenuhnya terbentuk sebagai satu sistem yang terpadu.

Kondisi tersebut ditunjukkan oleh masih terbatasnya sinkronisasi program antara pengelola kawasan utama, desa wisata, dan pelaku usaha lokal, baik dalam aspek promosi, pengembangan paket wisata terpadu, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, mekanisme koordinasi lintas lembaga masih bersifat insidental dan belum didukung oleh forum kolaborasi yang berjalan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun secara struktural kelembagaan sudah lengkap, dari sisi fungsi dan integrasi masih terdapat keterbatasan dalam efektivitas koordinasi pengembangan pariwisata di Kecamatan Borobudur. Kondisi ideal yang diharapkan adalah terbentuknya sistem kolaborasi antar stakeholder melalui pembagian peran yang jelas, sinkronisasi program pengembangan pariwisata, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, BOB, pemerintah desa, Pokdarwis, dan pelaku usaha sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara terpadu dan mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

## **4.2. Community Based Tourism**

### **4.2.1 Aspek Ekonomi**

Kondisi ekonomi lokal Kecamatan Borobudur dibentuk oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan, UMKM, kerajinan, kuliner, homestay, transportasi lokal, serta pekerjaan informal. Keberadaan Candi Borobudur memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi, terutama pada Desa Borobudur dan desa-desa yang berada di jalur wisata utama. Namun, pada skala kecamatan, ekonomi masyarakat masih sangat berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan kegiatan usaha rumah tangga.

Berdasarkan data pekerjaan dalam publikasi BPS Kecamatan Borobudur Dalam Angka 2025 (data tahun 2024), struktur pekerjaan penduduk didominasi oleh kelompok belum/tidak bekerja, mengurus rumah tangga, dan pensiunan sebesar 18.585 jiwa, pelajar/mahasiswa 11.971 jiwa, karyawan swasta 11.584 jiwa, petani/pekebun/peternak/perikanan 9.537 jiwa, wiraswasta 5.832 jiwa, buruh/pembantu rumah tangga 4.142 jiwa, serta perdagangan/pedagang 2.014 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa basis ekonomi lokal Kecamatan Borobudur tidak

hanya bertumpu pada pelaku wiraswasta, tetapi juga pada tenaga kerja swasta, sektor agraris, perdagangan, dan kelompok usia belajar yang dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan wisata berbasis masyarakat.

**Tabel 4. 5 Struktur Pekerjaan Penduduk Kecamatan Borobudur Menurut Publikasi BPS 2025 (Data 2024)**

| <b>Kategori Pekerjaan (Publikasi BPS 2025/Data 2024)</b>  | <b>Jumlah (jiwa)</b> | <b>Makna terhadap Ekonomi Lokal</b>                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum/tidak bekerja, mengurus rumah tangga, dan pensiunan | 18.585               | Menunjukkan perlunya penciptaan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses ekonomi rumah tangga |
| Pelajar/mahasiswa                                         | 11.971               | Menjadi potensi SDM muda untuk inovasi wisata, promosi digital, dan regenerasi pelaku ekonomi lokal                  |
| Karyawan swasta                                           | 11.584               | Menunjukkan besarnya basis tenaga kerja formal/nonformal yang dapat mendukung layanan wisata                         |
| Petani/pekebun/peternak/perikanan                         | 9.537                | Menunjukkan basis agraris yang dapat dikaitkan dengan agrowisata dan produk lokal                                    |
| Wiraswasta                                                | 5.832                | Menjadi modal pengembangan UMKM, perdagangan, jasa wisata, dan ekonomi kreatif                                       |
| Buruh/pembantu rumah tangga                               | 4.142                | Memerlukan peningkatan keterampilan agar dapat masuk ke rantai nilai pariwisata                                      |
| Perdagangan/pedagang                                      | 2.014                | Mendukung aktivitas ekonomi wisata melalui kuliner, souvenir, dan perdagangan lokal                                  |
| PNS/TNI/Kepolisian RI                                     | 910                  | Mendukung fungsi pelayanan publik dan stabilitas wilayah                                                             |
| Dosen/guru                                                | 529                  | Menjadi potensi pendampingan edukasi, literasi, dan penguatan kapasitas masyarakat                                   |



| Kategori Pekerjaan (Publikasi BPS 2025/Data 2024) | Jumlah (jiwa) | Makna terhadap Ekonomi Lokal                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karyawan BUMN/BUMD/honorer                        | 149           | Menunjukkan keberadaan tenaga pelayanan kelembagaan di tingkat lokal                                                  |
| Lainnya                                           | 888           | Menunjukkan keberagaman aktivitas ekonomi penduduk di luar kategori utama                                             |
| <b>Total Kecamatan Borobudur</b>                  | <b>66.141</b> | <b>Struktur penduduk bekerja dan tidak bekerja menjadi dasar penguatan strategi ekonomi lokal berbasis masyarakat</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, Kecamatan Borobudur Dalam Angka 2025; Hasil Analisis Penulis, 2026



**Gambar 4. 6 Aktivitas Ekonomi Lokal Pendukung Wisata Borobudur**

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2026

**Tabel 4. 6 Kepemilikan Usaha Terkait Wisata**

| Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---------|-----------|------------|
| Ya      | 46        | 46%        |
| Tidak   | 54        | 54%        |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

**Tabel 4. 7 Jenis Usaha Terkait Wisata**

| Jawaban                | Frekuensi | Persentase |
|------------------------|-----------|------------|
| Kuliner                | 13        | 28%        |
| Suvenir/kerajinan      | 11        | 24%        |
| Homestay               | 7         | 15%        |
| Jasa transportasi/sewa | 5         | 11%        |
| Perdagangan umum       | 8         | 17%        |
| Lainnya                | 2         | 4%         |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

**Tabel 4. 8 Pengaruh Pariwisata terhadap Pendapatan Responden**

| Jawaban           | Frekuensi | Persentase |
|-------------------|-----------|------------|
| Sangat meningkat  | 12        | 12%        |
| Meningkat         | 49        | 49%        |
| Tidak berpengaruh | 34        | 34%        |
| Menurun           | 5         | 5%         |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 46 responden memiliki usaha terkait wisata, sedangkan 54 responden tidak memiliki usaha wisata. Jenis usaha yang muncul antara lain kuliner, souvenir/kerajinan, homestay, jasa transportasi atau sewa kendaraan, perdagangan umum, dan usaha lainnya. Sebanyak 61 responden menyatakan bahwa pariwisata meningkatkan atau sangat meningkatkan pendapatan, sedangkan 39 responden menyatakan tidak berpengaruh atau menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa pariwisata telah memberi dampak ekonomi, tetapi manfaatnya belum merata kepada seluruh masyarakat.

**Tabel 4. 9 Hambatan Utama dalam Mengembangkan Usaha Wisata**

| Jawaban                | Frekuensi | Persentase |
|------------------------|-----------|------------|
| Modal terbatas         | 33        | 33%        |
| Pelatihan kurang       | 22        | 22%        |
| Pemasaran lemah        | 25        | 25%        |
| Akses wisatawan kurang | 18        | 18%        |
| Lainnya                | 2         | 2%         |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Wawancara dengan pelaku UMKM memperlihatkan bahwa pendapatan usaha sangat dipengaruhi oleh jumlah wisatawan, terutama pada akhir pekan, musim liburan, event budaya, atau kegiatan besar (ECN-UMKM-01). Kendala utama yang dirasakan pelaku UMKM adalah modal terbatas, promosi yang belum kuat, kualitas kemasan yang masih perlu ditingkatkan, persaingan usaha, dan akses wisatawan yang belum selalu melewati lokasi usaha masyarakat (PROB-UMKM-01). Hal yang sama juga muncul dalam kuesioner, yaitu hambatan pengembangan usaha wisata didominasi oleh modal terbatas sebesar 33%, pemasaran lemah sebesar 25%, pelatihan kurang sebesar 22%, dan akses wisatawan kurang sebesar 18% (PROB-UMKM-02).

Wawancara dengan pemilik homestay menunjukkan bahwa tingkat hunian belum stabil dan sangat dipengaruhi oleh musim liburan, akhir pekan, kegiatan komunitas, event budaya, dan perayaan tertentu (AMN-HOM-01). Homestay memberi tambahan pendapatan bagi keluarga, tetapi belum selalu menjadi sumber pendapatan utama karena banyak wisatawan masih berkunjung secara singkat (ECN-HOM-01). Kondisi ini menegaskan perlunya strategi memperpanjang lama tinggal wisatawan melalui paket wisata desa, atraksi budaya, kuliner, agrowisata, dan rute wisata antardesa (STR-TOUR-01).

#### 4.2.2 Aspek Sosial

Analisis kondisi sosial masyarakat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan indikator sosial dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT). Indikator tersebut meliputi: (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam pariwisata, (2) bentuk keterlibatan ekonomi masyarakat, (3) persebaran manfaat ekonomi pariwisata, (4) kelembagaan sosial, dan (5) pelestarian budaya lokal.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat terlibat dalam sistem pengembangan pariwisata di Kecamatan Borobudur, tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi dan budaya lokal.

**Tabel 4. 10 Penduduk Kecamatan Borobudur Menurut Publikasi BPS 2025 (Data 2024)**

| Desa                      | Jumlah Penduduk 2024 (jiwa) | Kepadatan 2024 (jiwa/km <sup>2</sup> ) | Keterangan Fungsi                                                  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Borobudur                 | 10.023                      | 2.195                                  | Pusat aktivitas wisata, perdagangan, jasa, dan pelayanan kecamatan |
| Wringinputih              | 6.512                       | 1.620                                  | Permukiman, pertanian, perdagangan lokal, dan potensi budaya       |
| Ngadiharjo                | 5.233                       | 821                                    | Wilayah permukiman dan pertanian dengan potensi penyangga          |
| Candirejo                 | 4.656                       | 1.182                                  | Desa wisata dan kawasan pendukung pariwisata budaya                |
| Wanurejo                  | 4.556                       | 1.528                                  | Kawasan penyangga wisata Candi Pawon dan aktivitas budaya          |
| Total Kecamatan Borobudur | 66.141                      | 1.148                                  | Terdiri atas 20 desa sebagai satu kesatuan lokasi studi            |

*Sumber: BPS Kabupaten Magelang, Kecamatan Borobudur Dalam Angka 2025; Hasil Analisis Penulis, 2026*



**Gambar 4. 7 Aktivitas Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Borobudur**

*Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2026*

**Tabel 4. 11 Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pariwisata**

| Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---------|-----------|------------|
| Ya      | 57        | 57%        |
| Tidak   | 43        | 43%        |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

**Tabel 4. 12 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pariwisata**

| Jawaban                        | Frekuensi | Persentase |
|--------------------------------|-----------|------------|
| Menjadi pelaku UMKM            | 28        | 28%        |
| Mengelola homestay             | 9         | 9%         |
| Mengelola atraksi budaya       | 16        | 16%        |
| Menjadi pemandu wisata         | 7         | 7%         |
| Kegiatan kebersihan/event desa | 21        | 21%        |
| Belum terlibat langsung        | 19        | 19%        |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

**Tabel 4. 13 Penilaian Responden terhadap Pentingnya Peran Masyarakat**

| Jawaban        | Frekuensi | Persentase |
|----------------|-----------|------------|
| Sangat penting | 65        | 65%        |
| Penting        | 32        | 32%        |
| Kurang penting | 3         | 3%         |
| Tidak penting  | 0         | 0%         |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Hasil kuesioner terhadap 100 responden memperlihatkan bahwa 57 responden menyatakan terlibat dalam kegiatan pariwisata, sedangkan 43 responden belum terlibat langsung. Bentuk keterlibatan masyarakat meliputi UMKM/produk lokal, homestay, atraksi budaya/kesenian, pemandu wisata, transportasi wisata, kuliner, dan kegiatan kebersihan atau event desa. Sementara itu, sebanyak 97 responden menilai peran masyarakat dalam pengembangan wisata penting atau sangat penting. Temuan ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan lokal sudah cukup kuat, tetapi partisipasi aktual masih perlu diperluas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 57% masyarakat telah terlibat dalam kegiatan pariwisata, sedangkan 43% lainnya belum terlibat secara langsung. Bentuk keterlibatan masyarakat didominasi oleh sektor UMKM, pengelolaan homestay, kegiatan kuliner, serta keterlibatan dalam atraksi budaya (UMKM-01). Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah terbentuk, namun masih berada pada tingkat parsial participation, karena belum mencakup seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Borobudur

#### 4.2.3 Aspek Budaya

Analisis aspek budaya dalam penelitian ini berfokus pada keberadaan budaya lokal serta persepsi masyarakat terhadap kondisi pelestarian budaya dalam aktivitas pariwisata di Kecamatan Borobudur.

**Tabel 4. 14 Penilaian Responden terhadap Kelestarian Budaya Lokal**

| Jawaban        | Frekuensi | Persentase |
|----------------|-----------|------------|
| Sangat terjaga | 19        | 19%        |
| Terjaga        | 61        | 61%        |
| Mulai hilang   | 17        | 17%        |
| Tidak terjaga  | 3         | 3%         |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Kecamatan Borobudur juga memiliki kekayaan sosial budaya yang dapat menjadi basis pengembangan wisata. Tradisi seperti Waisak, Ruwat Rawat Borobudur, Nyadran, Merti Desa, Suran, Napak Tilas, serta kesenian seperti Topeng Kawedar, Jathilan, Kubro, Karawitan, dan Angklung merupakan bagian dari identitas wilayah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 80 responden menilai budaya lokal masih terjaga atau sangat terjaga dengan adanya pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata dapat mendukung pelestarian budaya apabila masyarakat tetap menjadi pelaku utama, bukan hanya objek tontonan wisata.

#### 4.2.4 Aspek Politik

Analisis aspek politik dalam penelitian ini mengacu pada peran pemerintah, pemerintah desa, serta lembaga pengelola pariwisata dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengembangan pariwisata di Kecamatan Borobudur. Aspek ini digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan koordinasi antar stakeholder berjalan dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Dalam konteks kelembagaan, pengelolaan pariwisata di Kecamatan Borobudur melibatkan beberapa aktor utama, yaitu pemerintah daerah, Badan Otorita Borobudur (BOB), pemerintah desa, serta kelompok pengelola wisata di tingkat lokal. Setiap aktor memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan destinasi, baik dalam aspek regulasi, pengelolaan kawasan, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.

**Tabel 4. 15 Keterlibatan Stakeholder dalam Pengelolaan Pariwisata**

| Stakeholder       | Peran Utama                   | Tingkat Keterlibatan |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Pemerintah Daerah | Kebijakan dan regulasi        | Tinggi               |
| BOB               | Pengelolaan kawasan strategis | Tinggi               |
| Pemerintah Desa   | Pengembangan desa wisata      | Sedang               |
| Pokdarwis         | Operasional wisata lokal      | Sedang–Tinggi        |
| Pelaku usaha      | Aktivitas ekonomi wisata      | Sedang               |
| Stakeholder       | Peran Utama                   | Tingkat Keterlibatan |

*Sumber : Analisis Penulis, 2026*

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur kelembagaan pariwisata di Kecamatan Borobudur sudah terbentuk secara formal pada berbagai tingkatan. Namun, koordinasi antar stakeholder masih belum sepenuhnya berjalan secara terpadu. Beberapa program pengembangan masih bersifat sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, sehingga integrasi perencanaan dan pelaksanaan pariwisata belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek politik dalam pengembangan pariwisata sudah memiliki dasar kelembagaan yang jelas, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam hal sinkronisasi kebijakan dan efektivitas koordinasi antar aktor pengelola pariwisata di tingkat kawasan maupun desa.

#### **4.2.5 Aspek Lingkungan**

Kondisi lingkungan Kecamatan Borobudur memiliki nilai strategis karena wilayah ini merupakan lanskap budaya yang menggabungkan cagar budaya, permukiman, pertanian, perkebunan, sungai, dan perbukitan. Kualitas lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik wisata serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pengembangan wisata yang tidak terkendali dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengurangi karakter pedesaan yang justru menjadi kekuatan Borobudur.

Secara umum, Kecamatan Borobudur masih memiliki kualitas lingkungan yang ditopang oleh keberadaan kebun, tegalan, sawah, sungai, dan ruang terbuka. Elemen-elemen tersebut membentuk lanskap pedesaan yang mendukung pengalaman wisata budaya dan alam. Sawah dan kebun tidak hanya berfungsi sebagai ruang produksi, tetapi juga sebagai elemen visual yang memperkuat identitas kawasan sekitar Candi

Borobudur. Oleh karena itu, pelestarian lanskap pertanian perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat.

**Tabel 4. 16 Ancaman Terbesar terhadap Pengembangan Wisata**

| <b>Jawaban</b>               | <b>Frekuensi</b> | <b>Persentase</b> |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Kerusakan lingkungan         | 36               | 36%               |
| Komersialisasi budaya        | 20               | 20%               |
| Persaingan antar desa wisata | 17               | 17%               |
| Keterbatasan lahan           | 23               | 23%               |
| Lainnya                      | 4                | 4%                |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel ancaman pengembangan wisata, tekanan lingkungan menjadi perhatian utama masyarakat. Kerusakan lingkungan dipilih oleh 36 responden sebagai ancaman terbesar, disusul keterbatasan lahan oleh 23 responden, komersialisasi budaya oleh 20 responden, persaingan antar desa wisata oleh 17 responden, dan lainnya oleh 4 responden. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat menyadari adanya risiko lingkungan dan sosial budaya dalam pengembangan pariwisata, sehingga pengembangan wisata perlu diarahkan pada pelestarian lanskap, pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, dan penataan aktivitas wisata.

Dengan demikian, kondisi lingkungan Kecamatan Borobudur menunjukkan adanya potensi dan tekanan yang harus dikelola secara seimbang. Potensinya berupa lanskap hijau, lahan pertanian, sungai, perbukitan, dan cagar budaya. Tekanannya berupa alih fungsi lahan, sampah, drainase, kepadatan aktivitas wisata, serta penurunan kualitas ruang publik. Pengembangan wisata berbasis masyarakat harus diarahkan pada pengelolaan lingkungan terpadu, konservasi lanskap budaya, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penataan aktivitas informal agar tidak mengurangi kualitas kawasan.

Berdasarkan rangkaian pembahasan tersebut, kondisi eksisting Kecamatan Borobudur menunjukkan bahwa pengembangan wisata perlu diarahkan secara menyeluruh pada skala kecamatan. Kawasan inti Candi Borobudur dan desa-desa dengan aksesibilitas tinggi berperan sebagai simpul utama aktivitas wisata, sedangkan desa-desa penyangga memiliki peluang untuk memperkuat wisata budaya, agrowisata, kerajinan, kuliner, homestay, dan ekonomi kreatif lokal. Oleh karena itu, strategi pengembangan pada tahap berikutnya perlu menekankan pemerataan manfaat



ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan desa wisata, penataan aksesibilitas, pengelolaan lingkungan, dan pelestarian lanskap budaya Borobudur.



**Gambar 4. 8 Kondisi Lingkungan dan Lanskap Budaya Kecamatan Borobudur**  
*Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2026*

### 4.3 Analisis Potensi dan Permasalahan Pengembangan Wisata

Analisis pengembangan wisata dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 4A (*attraction, accessibility, amenities, dan ancillary*) yang umum digunakan dalam kajian destinasi wisata di berbagai penelitian pariwisata Indonesia 2019–2025. Selain itu, analisis ini diperkuat dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) yang menekankan partisipasi masyarakat, serta aspek ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan sebagai dampak pengembangan pariwisata. Kombinasi pendekatan ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara potensi, permasalahan, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Kecamatan Borobudur

#### 4.3.1 Potensi Pengembangan Wisata

Potensi pengembangan wisata dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pendekatan 4A (*attraction, accessibility, amenities, ancillary*) serta diperkuat dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) dan ekonomi lokal. Hal ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara potensi wisata, keterlibatan masyarakat, dan dampak ekonomi di Kecamatan Borobudur.

**Tabel 4. 17 Potensi Wisata Terbesar Menurut Responden**

| Jawaban         | Frekuensi | Persentase |
|-----------------|-----------|------------|
| Budaya/kesenian | 34        | 34%        |
| Kuliner & UMKM  | 25        | 25%        |
| Alam/lanskap    | 23        | 23%        |
| Sejarah         | 15        | 15%        |
| Lainnya         | 3         | 3%         |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wisata di Kecamatan Borobudur tidak hanya bertumpu pada Candi Borobudur sebagai destinasi utama, tetapi juga mencakup wisata budaya, alam, sejarah, serta aktivitas ekonomi lokal. Berdasarkan klasifikasi Jurnal Kepariwisata Indonesia (2025), wisata budaya menjadi potensi dominan dengan persentase 34%, yang menunjukkan bahwa kekuatan utama pariwisata Borobudur masih berbasis pada kearifan lokal masyarakat.

Selain itu, aktivitas ekonomi lokal seperti UMKM dan kuliner sebesar 25% menunjukkan bahwa sektor ekonomi masyarakat telah menjadi bagian dari sistem pariwisata berbasis CBT. Wisata alam (23%) dan wisata sejarah (15%) memperkuat bahwa pengembangan pariwisata di kawasan ini bersifat multi-aspek, tidak hanya berbasis heritage tetapi juga berbasis masyarakat. masyarakat.

#### 4.3.1.1 Potensi Wisata Budaya dan Sejarah

Potensi utama Kecamatan Borobudur adalah keberadaan Candi Borobudur sebagai daya tarik wisata budaya dan sejarah berskala nasional maupun internasional. Candi Borobudur menjadi pusat orientasi kawasan dan menjadi faktor utama yang menarik kunjungan wisatawan ke Kecamatan Borobudur. Selain Candi Borobudur, kawasan sekitar juga memiliki keterkaitan dengan Candi Pawon dan Candi Mendut, sehingga membentuk jejaring wisata budaya yang kuat.

Potensi budaya tidak hanya terletak pada peninggalan fisik candi, tetapi juga pada tradisi dan kesenian masyarakat lokal. Tradisi seperti Waisak, Ruwat Rawat Borobudur, Nyadran, Merti Desa, Suran, Napak Tilas, serta kesenian lokal seperti Jathilan, Kubro, Karawitan, Angklung, dan Topeng Kawedar dapat menjadi daya tarik wisata berbasis pengalaman. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 80 responden menilai budaya lokal masih terjaga atau sangat terjaga dengan adanya pariwisata. Kondisi ini menjadi modal penting karena pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan budaya lokal yang masih hidup dan didukung oleh masyarakatnya.

**Tabel 4. 18 Penilaian Responden terhadap Kelestarian Budaya Lokal**

| Jawaban        | Frekuensi | Persentase |
|----------------|-----------|------------|
| Sangat terjaga | 19        | 19%        |
| Terjaga        | 61        | 61%        |
| Mulai hilang   | 17        | 17%        |

| Jawaban       | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-----------|------------|
| Tidak terjaga | 3         | 3%         |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 19 responden menilai budaya lokal sangat terjaga dan 61 responden menilai budaya lokal terjaga. Sementara itu, 17 responden menilai budaya lokal mulai hilang dan 3 responden menilai tidak terjaga. Hasil ini memperlihatkan bahwa secara umum budaya lokal masih menjadi kekuatan Kecamatan Borobudur, tetapi tetap membutuhkan perlindungan agar tidak hanya menjadi komoditas wisata. Wawancara dengan pengelola desa wisata juga menunjukkan bahwa atraksi budaya perlu dikemas tanpa menghilangkan nilai sosial dan makna tradisinya bagi masyarakat lokal.



**Gambar 4. 9 Potensi Wisata Budaya Kecamatan Borobudur**

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2026

#### 4.3.1.2 Potensi Wisata Alam, Lanskap, dan Pertanian

Kondisi fisik Kecamatan Borobudur yang terdiri atas dataran, lahan pertanian, kebun, sawah, sungai, serta kawasan perbukitan Menoreh membentuk potensi wisata alam dan lanskap perdesaan. Wilayah bagian selatan dan barat seperti Giritengah, Giripurno, Majaksingi, Karangrejo, dan Ngadiharjo memiliki karakter perbukitan yang dapat dikembangkan sebagai wisata panorama, trekking, wisata sepeda, agrowisata, dan wisata pedesaan berbasis lingkungan.

Penggunaan lahan yang masih didominasi kebun, tegalan, dan sawah menunjukkan bahwa karakter agraris Kecamatan Borobudur masih kuat. Hal ini menjadi potensi karena aktivitas pertanian dapat dikembangkan sebagai wisata edukasi pertanian, pengalaman hidup di desa, kuliner berbasis produk lokal, dan agrowisata. Potensi ini sejalan dengan hasil kuesioner, yaitu alam/lanskap dipilih oleh 23 responden sebagai potensi wisata terbesar, sedangkan kuliner dan UMKM dipilih oleh 25 responden. Dengan demikian, potensi alam dan pertanian perlu dikaitkan dengan

kegiatan ekonomi masyarakat agar manfaat wisata tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan inti candi.



**Gambar 4. 10 Potensi Lanskap dan Pertanian Kecamatan Borobudur**

*Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2026*

#### 4.3.1.3 Potensi Ekonomi Lokal, UMKM, dan Homestay

Potensi ekonomi lokal Kecamatan Borobudur terlihat dari berkembangnya UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, jasa transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan wisata. Keberadaan Candi Borobudur sebagai daya tarik utama memberikan peluang pasar bagi masyarakat lokal, terutama pada desa-desa yang memiliki aksesibilitas tinggi dan dekat dengan kawasan inti wisata. Namun, potensi ekonomi lokal juga perlu diperluas ke desa-desa penyangga agar penguatan ekonomi tidak hanya terjadi di sekitar kawasan inti.

**Tabel 4. 19 Kepemilikan Usaha Terkait Wisata**

| Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---------|-----------|------------|
| Ya      | 46        | 46%        |
| Tidak   | 54        | 54%        |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, 46 responden memiliki usaha terkait wisata, sedangkan 54 responden tidak memiliki usaha terkait wisata. Hasil ini menunjukkan bahwa sektor wisata telah membuka peluang usaha bagi masyarakat, tetapi belum menjadi sumber kegiatan ekonomi bagi mayoritas responden. Oleh karena itu, strategi pengembangan wisata perlu memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha, terutama melalui penguatan UMKM, promosi produk lokal, peningkatan kualitas layanan, dan integrasi usaha masyarakat ke dalam paket wisata desa.

**Tabel 4. 20 Jenis Usaha Terkait Wisata**

| Jawaban                | Frekuensi | Persentase |
|------------------------|-----------|------------|
| Kuliner                | 13        | 28%        |
| Suvenir/kerajinan      | 11        | 24%        |
| Homestay               | 7         | 15%        |
| Jasa transportasi/sewa | 5         | 11%        |

| Jawaban          | Frekuensi | Persentase |
|------------------|-----------|------------|
| Perdagangan umum | 8         | 17%        |
| Lainnya          | 2         | 4%         |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Jenis usaha terkait wisata yang paling banyak muncul adalah kuliner sebanyak 13 responden, suvenir/kerajinan sebanyak 11 responden, perdagangan umum sebanyak 8 responden, homestay sebanyak 7 responden, jasa transportasi/sewa sebanyak 5 responden, dan lainnya sebanyak 2 responden. Komposisi ini menunjukkan bahwa ekonomi wisata Borobudur memiliki basis usaha kecil yang cukup beragam. Wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produk, pengemasan, promosi digital, modal usaha, dan akses ke wisatawan menjadi kebutuhan utama agar usaha lokal dapat berkembang.

**Tabel 4. 21 Pengaruh Pariwisata terhadap Pendapatan Responden**

| Jawaban           | Frekuensi | Persentase |
|-------------------|-----------|------------|
| Sangat meningkat  | 12        | 12%        |
| Meningkat         | 49        | 49%        |
| Tidak berpengaruh | 34        | 34%        |
| Menurun           | 5         | 5%         |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 12 responden menyatakan pendapatan sangat meningkat dan 49 responden menyatakan meningkat karena pariwisata. Sementara itu, 34 responden menyatakan tidak berpengaruh dan 5 responden menyatakan menurun. Artinya, pariwisata telah memberikan pengaruh ekonomi bagi sebagian masyarakat, tetapi dampaknya belum merata. Hasil wawancara dengan pemilik homestay dan pelaku UMKM juga menunjukkan bahwa pendapatan sangat dipengaruhi oleh musim kunjungan, event budaya, lokasi usaha, promosi, dan keterhubungan dengan arus wisatawan.



**Gambar 4. 11 Potensi Ekonomi Lokal Pendukung Wisata Borobudur.**

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2026

#### 4.3.1.4 Potensi Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal

Pengembangan wisata berbasis masyarakat membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama. Kecamatan Borobudur memiliki modal sosial berupa masyarakat lokal, pemerintah desa, Pokdarwis, kelompok seni, pelaku UMKM, pemilik homestay, serta komunitas yang dapat mendukung pengembangan wisata desa. Keterlibatan ini menjadi penting karena wisata berbasis masyarakat tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi dan menjaga identitas lokal.

**Tabel 4. 22 Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pariwisata**

| Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---------|-----------|------------|
| Ya      | 57        | 57%        |
| Tidak   | 43        | 43%        |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, 57 responden menyatakan terlibat dalam kegiatan pariwisata, sedangkan 43 responden belum terlibat langsung. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah terbentuk, tetapi belum merata. Wawancara dengan perangkat desa dan Pokdarwis juga menunjukkan bahwa masyarakat yang berada dekat jalur wisata atau memiliki usaha cenderung lebih aktif, sedangkan masyarakat yang berada jauh dari pusat kunjungan belum selalu memperoleh manfaat langsung dari aktivitas wisata.

**Tabel 4. 23 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pariwisata**

| Jawaban                        | Frekuensi | Persentase |
|--------------------------------|-----------|------------|
| Menjadi pelaku UMKM            | 28        | 28%        |
| Mengelola homestay             | 9         | 9%         |
| Mengelola atraksi budaya       | 16        | 16%        |
| Menjadi pemandu wisata         | 7         | 7%         |
| Kegiatan kebersihan/event desa | 21        | 21%        |
| Belum terlibat langsung        | 19        | 19%        |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan masyarakat adalah menjadi pelaku UMKM sebanyak 28 responden, mengikuti kegiatan kebersihan atau event desa sebanyak 21 responden, mengelola atraksi budaya sebanyak 16 responden, mengelola homestay sebanyak 9 responden, menjadi pemandu wisata sebanyak 7 responden, dan belum terlibat langsung sebanyak 19 responden. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih banyak berada pada kegiatan ekonomi skala kecil dan

kegiatan sosial desa. Ke depan, partisipasi tersebut perlu ditingkatkan menuju keterlibatan dalam perencanaan, pengelolaan paket wisata, promosi, dan pengambilan keputusan.

**Tabel 4. 24 Penilaian Responden terhadap Pentingnya Peran Masyarakat**

| Jawaban        | Frekuensi | Persentase |
|----------------|-----------|------------|
| Sangat penting | 65        | 65%        |
| Penting        | 32        | 32%        |
| Kurang penting | 3         | 3%         |
| Tidak penting  | 0         | 0%         |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 65 responden menilai peran masyarakat sangat penting dan 32 responden menilai penting. Hanya 3 responden yang menilai kurang penting dan tidak ada responden yang menilai tidak penting. Temuan ini menjadi dasar kuat bahwa pengembangan wisata di Kecamatan Borobudur perlu diarahkan dengan pendekatan berbasis masyarakat, karena masyarakat sendiri memahami pentingnya keterlibatan lokal dalam pengembangan wisata.

Secara keseluruhan, potensi pengembangan wisata di Kecamatan Borobudur menunjukkan adanya keterkaitan antara aspek 4A, CBT, dan ekonomi lokal, namun masih terdapat ketimpangan distribusi manfaat yang menunjukkan bahwa sistem pariwisata belum sepenuhnya berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

#### **4.3.2 Permasalahan dan Kendala Pengembangan Wisata**

Selain memiliki berbagai potensi, pengembangan wisata Kecamatan Borobudur juga menghadapi sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi ketimpangan perkembangan wisata, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, belum meratanya partisipasi masyarakat, hambatan pengembangan UMKM, tekanan lingkungan, serta risiko perubahan lahan. Permasalahan ini perlu diidentifikasi sebagai dasar penyusunan strategi agar pengembangan wisata tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan keberlanjutan sosial, ruang, dan lingkungan.

**Tabel 4. 25 Masalah Terbesar dalam Pengembangan Wisata Desa**

| Jawaban                       | Frekuensi | Persentase |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Minim promosi                 | 31        | 31%        |
| Minim fasilitas               | 24        | 24%        |
| Partisipasi masyarakat rendah | 17        | 17%        |

|                           |    |     |
|---------------------------|----|-----|
| Pengelolaan tidak optimal | 24 | 24% |
| Lainnya                   | 4  | 4%  |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, masalah terbesar dalam pengembangan wisata desa adalah minim promosi yang dipilih oleh 31 responden. Masalah berikutnya adalah minim fasilitas dan pengelolaan tidak optimal yang masing-masing dipilih oleh 24 responden, partisipasi masyarakat rendah sebanyak 17 responden, dan lainnya sebanyak 4 responden. Hasil ini menunjukkan bahwa kendala pengembangan wisata tidak hanya berkaitan dengan fisik wilayah, tetapi juga dengan promosi, kelembagaan, fasilitas, dan keterlibatan masyarakat.

#### 4.3.2.1 Ketimpangan Perkembangan Wisata dan Pemerataan Manfaat Ekonomi

Perkembangan aktivitas wisata di Kecamatan Borobudur masih cenderung terkonsentrasi pada kawasan inti Candi Borobudur dan desa-desa yang memiliki aksesibilitas tinggi, seperti Borobudur, Wanurejo, Tuksongo, dan Candirejo. Kondisi ini menyebabkan manfaat ekonomi lebih mudah diterima oleh masyarakat yang berada dekat dengan koridor utama wisata. Sebaliknya, desa-desa di kawasan perbukitan atau yang berada lebih jauh dari jalur kunjungan belum memperoleh manfaat yang sama meskipun memiliki potensi alam, budaya, dan pertanian.

**Tabel 4. 26 Frekuensi Kunjungan Wisatawan ke Desa Menurut Responden**

| Jawaban       | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-----------|------------|
| Sangat sering | 14        | 14%        |
| Cukup sering  | 43        | 43%        |
| Jarang        | 38        | 38%        |
| Tidak pernah  | 5         | 5%         |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, 14 responden menyatakan wisatawan sangat sering berkunjung ke desa dan 43 responden menyatakan cukup sering. Namun, 38 responden menyatakan wisatawan jarang berkunjung dan 5 responden menyatakan tidak pernah. Temuan ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke desa belum merata. Beberapa desa yang dekat dengan kawasan inti cenderung lebih sering menerima kunjungan, sedangkan desa lain masih membutuhkan penguatan promosi, akses, dan paket wisata agar dapat terhubung dengan arus wisatawan Borobudur.



#### 4.3.2.2 Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas Lokal

Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas lokal menjadi kendala penting dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Meskipun akses utama menuju Borobudur relatif baik, akses menuju beberapa desa wisata dan kawasan perbukitan masih menghadapi hambatan berupa jalan lokal yang sempit, berkelok, mengikuti kontur lereng, keterbatasan transportasi wisata, area parkir, papan informasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

**Tabel 4. 27 Kondisi Akses Menuju Destinasi Wisata Menurut Responden**

| Jawaban      | Frekuensi | Persentase |
|--------------|-----------|------------|
| Sangat mudah | 18        | 18%        |
| Mudah        | 56        | 56%        |
| Sulit        | 22        | 22%        |
| Sangat sulit | 4         | 4%         |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, 18 responden menilai akses menuju destinasi wisata sangat mudah dan 56 responden menilai mudah. Namun, masih terdapat 22 responden yang menilai sulit dan 4 responden menilai sangat sulit. Hal ini memperlihatkan bahwa akses utama telah cukup mendukung, tetapi akses lokal menuju beberapa desa dan kawasan perbukitan masih perlu ditingkatkan agar manfaat wisata dapat tersebar lebih merata.

**Tabel 4. 28 Kendala Infrastruktur Pendukung Wisata Menurut Responden**

| Jawaban           | Frekuensi | Persentase |
|-------------------|-----------|------------|
| Ya, sering        | 18        | 18%        |
| Ya, kadang-kadang | 48        | 48%        |
| Jarang            | 24        | 24%        |
| Tidak ada         | 10        | 10%        |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Kendala infrastruktur masih dirasakan oleh sebagian responden. Sebanyak 18 responden menyatakan kendala sering terjadi dan 48 responden menyatakan kendala terjadi kadang-kadang. Sementara itu, 24 responden menyatakan jarang dan 10 responden menyatakan tidak ada kendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur desa, drainase, ruang pedestrian, fasilitas parkir, dan prasarana wisata masih menjadi kebutuhan penting.

#### 4.3.2.3 Kendala Pengembangan UMKM dan Usaha Wisata Lokal

Pengembangan UMKM dan usaha wisata lokal menghadapi kendala yang berkaitan dengan modal, promosi, pelatihan, kualitas produk, dan akses terhadap wisatawan. Pelaku UMKM memiliki peluang untuk memperoleh manfaat dari sektor wisata, tetapi belum semua pelaku usaha mampu menjangkau pasar wisatawan secara optimal. Wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa pendapatan usaha sangat bergantung pada musim kunjungan dan lokasi usaha.

**Tabel 4. 29 Hambatan Utama dalam Mengembangkan Usaha Wisata**

| Jawaban                | Frekuensi | Persentase |
|------------------------|-----------|------------|
| Modal terbatas         | 33        | 33%        |
| Pelatihan kurang       | 22        | 22%        |
| Pemasaran lemah        | 25        | 25%        |
| Akses wisatawan kurang | 18        | 18%        |
| Lainnya                | 2         | 2%         |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, hambatan utama dalam mengembangkan usaha wisata adalah modal terbatas yang dipilih oleh 33 responden, pemasaran lemah sebanyak 25 responden, pelatihan kurang sebanyak 22 responden, akses wisatawan kurang sebanyak 18 responden, dan lainnya sebanyak 2 responden. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan wisatawan, tetapi membutuhkan pendampingan usaha, akses modal, promosi digital, peningkatan kualitas produk, dan penghubungan UMKM dengan paket wisata.

**Tabel 4. 30 Dukungan Program Pemerintah atau BOB terhadap Masyarakat**

| Jawaban         | Frekuensi | Persentase |
|-----------------|-----------|------------|
| Sangat terbantu | 7         | 7%         |
| Terbantu        | 38        | 38%        |
| Kurang terbantu | 41        | 41%        |
| Tidak terbantu  | 14        | 14%        |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, 7 responden merasa sangat terbantu dan 38 responden merasa terbantu oleh program pemerintah atau BOB. Namun, 41 responden merasa kurang terbantu dan 14 responden merasa tidak terbantu. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan telah ada, tetapi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, program pengembangan

wisata perlu diperkuat melalui pendampingan yang lebih langsung kepada pelaku UMKM, Pokdarwis, homestay, dan kelompok masyarakat di desa penyangga.

#### 4.3.2.4 Belum Optimalnya Partisipasi dan Kolaborasi Stakeholder

Pengembangan wisata berbasis masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku UMKM, BOB, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Namun, hasil kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut masih perlu diperkuat. Sebagian masyarakat belum terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sedangkan sebagian lainnya hanya terlibat sebagai pelaku ekonomi skala kecil.

**Tabel 4. 31 Pelibatan Masyarakat dalam Musyawarah atau Perencanaan Wisata**

| Jawaban       | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-----------|------------|
| Selalu        | 12        | 12%        |
| Kadang-kadang | 41        | 41%        |
| Jarang        | 30        | 30%        |
| Tidak pernah  | 17        | 17%        |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, hanya 12 responden yang menyatakan masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah atau perencanaan wisata. Sebanyak 41 responden menyatakan kadang-kadang, 30 responden menyatakan jarang, dan 17 responden menyatakan tidak pernah. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya penting dalam pelaksanaan kegiatan wisata, tetapi juga dalam perumusan program, pengelolaan, dan pembagian manfaat.

**Tabel 4. 32 Tingkat Kolaborasi Antar Stakeholder**

| Jawaban     | Frekuensi | Persentase |
|-------------|-----------|------------|
| Sangat baik | 8         | 8%         |
| Baik        | 42        | 42%        |
| Cukup       | 39        | 39%        |
| Buruk       | 11        | 11%        |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, 8 responden menilai kolaborasi antar stakeholder sangat baik, 42 responden menilai baik, 39 responden menilai cukup, dan 11 responden menilai buruk. Artinya, kolaborasi telah berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menjadi penting karena pengembangan wisata Borobudur melibatkan

banyak pihak, mulai dari BOB, pemerintah daerah, pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku UMKM, homestay, komunitas budaya, dan masyarakat lokal.

#### 4.3.2.5 Tekanan Lingkungan dan Perubahan Lahan

Tekanan terhadap lingkungan dan perubahan lahan menjadi permasalahan penting dalam pengembangan wisata Kecamatan Borobudur. Perkembangan aktivitas wisata dapat mendorong peningkatan kawasan terbangun, alih fungsi lahan pertanian, peningkatan volume sampah, kepadatan lalu lintas, dan tekanan terhadap ruang publik. Kondisi ini perlu diantisipasi agar pengembangan wisata tidak mengurangi kualitas lanskap budaya dan karakter pedesaan Borobudur.

**Tabel 4. 33 Ancaman Terbesar terhadap Pengembangan Wisata**

| Jawaban                      | Frekuensi | Persentase |
|------------------------------|-----------|------------|
| Kerusakan lingkungan         | 36        | 36%        |
| Komersialisasi budaya        | 20        | 20%        |
| Persaingan antar desa wisata | 17        | 17%        |
| Keterbatasan lahan           | 23        | 23%        |
| Lainnya                      | 4         | 4%         |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, ancaman terbesar dalam pengembangan wisata adalah kerusakan lingkungan yang dipilih oleh 36 responden, disusul keterbatasan lahan sebanyak 23 responden, komersialisasi budaya sebanyak 20 responden, persaingan antar desa wisata sebanyak 17 responden, dan lainnya sebanyak 4 responden. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari risiko lingkungan dan sosial budaya dari perkembangan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan wisata harus disertai pengelolaan sampah, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian lanskap pertanian, dan perlindungan budaya lokal.

**Tabel 4. 34 Perhatian Kegiatan Wisata terhadap Kelestarian Lingkungan**

| Jawaban       | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-----------|------------|
| Selalu        | 12        | 12%        |
| Kadang-kadang | 50        | 50%        |
| Jarang        | 28        | 28%        |
| Tidak pernah  | 10        | 10%        |

*Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026*

Berdasarkan tabel tersebut, 12 responden menyatakan kegiatan wisata selalu memperhatikan kelestarian lingkungan, 50 responden menyatakan kadang-kadang, 28 responden menyatakan jarang, dan 10 responden menyatakan tidak pernah. Temuan ini

memperlihatkan bahwa prinsip keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi praktik yang konsisten dalam pengembangan wisata. Oleh karena itu, pengembangan wisata berbasis masyarakat perlu memasukkan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari kegiatan desa wisata, UMKM, homestay, dan aktivitas wisata luar ruang.



**Gambar 4. 12 Permasalahan Lingkungan dan Ruang Pendukung Wisata Borobudur.**

*Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2026*

#### 4.3.3 Sintesis Potensi dan Permasalahan Pengembangan Wisata

Sintesis pengembangan wisata Kecamatan Borobudur dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan integrasi komponen 4A (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary*) yang diperkuat dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT), ekonomi lokal, dan lingkungan berkelanjutan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara kekuatan potensi dan permasalahan dalam sistem pengembangan wisata yang berbasis masyarakat.

**Tabel 4. 35 Sintesis Potensi dan Permasalahan Pengembangan Wisata Kecamatan Borobudur**

| Komponen      | Potensi                                             | Permasalahan                                | Implikasi Analisis              |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Attraction    | Candi Borobudur, Pawon, Mendut, budaya, event, UMKM | Komersialisasi budaya, atraksi belum merata | Attraction kuat tetapi terpusat |
| Accessibility | Akses utama baik, jaringan desa terhubung           | Akses desa wisata & perbukitan terbatas     | Distribusi wisata tidak merata  |
| Amenities     | Homestay, kuliner, UMKM berkembang                  | Fasilitas tidak merata antar desa           | Pengalaman wisata tidak setara  |
| Ancillary     | Pokdarwis, BOB, Pemdus, komunitas                   | Koordinasi belum optimal                    | Kelembagaan belum terintegrasi  |
| CBT           | Partisipasi masyarakat, UMKM aktif                  | Partisipasi perencanaan masih rendah        | CBT belum inklusif              |
| Ekonomi lokal | UMKM, homestay, jasa wisata                         | Modal & promosi terbatas                    | Ekonomi tidak merata            |
| Lingkungan    | Lanskap hijau, pertanian, budaya desa               | Sampah, alih fungsi lahan                   | Tekanan lingkungan meningkat    |

*Sumber: Hasil Analisis Penulis berdasarkan Kuesioner, Wawancara, dan Data Kondisi Eksisting, 2026*

Sistem pengembangan wisata Kecamatan Borobudur menunjukkan bahwa attraction masih menjadi kekuatan utama, terutama Candi Borobudur, namun bersifat terpusat sehingga belum mendorong pemerataan ke desa penyangga. Pada aspek accessibility, keterhubungan antar desa masih terbatas sehingga aliran wisata masih terfokus di kawasan inti. Pada aspek amenities, fasilitas seperti homestay, kuliner, dan UMKM sudah berkembang tetapi belum merata antar desa. Sementara itu, ancillary sudah terbentuk melalui Pokdarwis, BOB, dan pemerintah desa, namun belum terintegrasi secara optimal.

Dalam perspektif CBT, partisipasi masyarakat sudah ada melalui UMKM, homestay, dan kegiatan budaya, tetapi masih bersifat parsial dan belum mencakup perencanaan. Dari sisi ekonomi lokal, dampak pariwisata sudah dirasakan namun distribusinya belum merata antar wilayah. Dari aspek lingkungan, potensi lanskap masih kuat, tetapi mulai tertekan oleh sampah, alih fungsi lahan, dan kepadatan wisata. Secara keseluruhan, sistem pariwisata Borobudur masih berada pada tahap transisi menuju pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

#### **4.4 Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat**

Analisis stakeholder disusun untuk menjawab sasaran ketiga penelitian, yaitu menganalisis peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Borobudur. Pengembangan wisata Borobudur melibatkan banyak aktor karena kawasan ini tidak hanya berkaitan dengan objek wisata Candi Borobudur, tetapi juga dengan desa wisata, UMKM, homestay, budaya lokal, aksesibilitas, pelestarian lingkungan, dan kebijakan pengembangan destinasi prioritas. Oleh karena itu, analisis stakeholder diperlukan untuk memahami siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana perannya, kepentingannya, dan bagaimana hubungan antar aktor memengaruhi pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Teknik analisis yang digunakan pada subbab ini adalah analisis stakeholder dengan pendekatan CATWOE. CATWOE digunakan untuk membaca sistem pengembangan wisata secara lebih menyeluruh melalui enam elemen, yaitu *Customer*, *Actor*, *Transformation*, *Weltanschauung*, *Owner*, dan *Environmental Constraints*.

Melalui pendekatan ini, pengembangan wisata tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fasilitas atau peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi sebagai proses perubahan yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, lembaga pengelola kawasan, pelaku usaha, serta batasan lingkungan dan kebijakan.

Analisis stakeholder dalam penelitian ini merupakan bagian dari sistem pengembangan wisata berbasis 4A (*attraction, accessibility, amenities, ancillary*) yang diperkuat dengan pendekatan Community Based Tourism (CBT), ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, stakeholder tidak hanya dipahami sebagai aktor formal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang mempengaruhi distribusi manfaat, pengelolaan destinasi, serta keberlanjutan pengembangan wisata di Kecamatan Borobudur.

#### 4.4.1 Identifikasi Stakeholder Pengembangan Wisata Borobudur

Stakeholder dalam pengembangan wisata Kecamatan Borobudur dapat dikelompokkan menjadi stakeholder pemerintah, kelembagaan pengelola kawasan, kelembagaan desa, pelaku ekonomi lokal, masyarakat, serta lembaga/komunitas pendukung. Identifikasi stakeholder dilakukan berdasarkan peran, kepentingan, pengaruh, dan keterlibatan masing-masing aktor terhadap pengembangan wisata berbasis masyarakat.

**Tabel 4. 36 Identifikasi Stakeholder Pengembangan Wisata Kecamatan Borobudur**

| Stakeholder                                                              | Kategori                      | Peran Utama                                                                                                                                           | Kepentingan                                                                                             | Tingkat Pengaruh                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perangkat Desa Borobudur dan pemerintah desa lain di Kecamatan Borobudur | Pemerintah lokal/desa         | Menyusun program desa, mengoordinasikan masyarakat, mendukung kegiatan desa wisata, dan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah. | Penguatan ekonomi desa, peningkatan PADes, keterlibatan masyarakat, dan penataan aktivitas wisata desa. | Tinggi pada skala desa karena memiliki kewenangan administratif dan kedekatan dengan masyarakat. |
| Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata                                          | Kelembagaan masyarakat wisata | Mengelola atraksi, paket wisata, kegiatan budaya,                                                                                                     | Peningkatan kunjungan desa wisata,                                                                      | Tinggi pada pengelolaan operasional                                                              |

| Stakeholder                                      | Kategori                              | Peran Utama                                                                                                                              | Kepentingan                                                                                                            | Tingkat Pengaruh                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                       | homestay, promosi desa, serta pemberdayaan masyarakat.                                                                                   | penguatan atraksi lokal, dan pemerataan manfaat wisata.                                                                | desa wisata, tetapi bergantung pada dukungan pemerintah dan pasar wisata.               |
| Pelaku UMKM, kuliner, kerajinan, dan jasa wisata | Pelaku ekonomi lokal                  | Menyediakan produk lokal, kuliner, suvenir, jasa transportasi, dan layanan pendukung wisata.                                             | Peningkatan pendapatan, akses pasar wisatawan, promosi, modal, dan pelatihan usaha.                                    | Sedang; berpengaruh pada ekonomi lokal tetapi memiliki keterbatasan modal dan jaringan. |
| Pemilik Homestay                                 | Pelaku akomodasi lokal                | Menyediakan akomodasi berbasis rumah masyarakat dan mendukung pengalaman wisata desa.                                                    | Peningkatan tingkat hunian, promosi, kualitas pelayanan, dan integrasi dengan paket wisata desa.                       | Sedang; berperan pada lama tinggal wisatawan dan ekonomi keluarga.                      |
| Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang              | Pemerintah daerah                     | Menyusun program pariwisata daerah, promosi destinasi, pembinaan desa wisata, fasilitasi event, dan peningkatan kapasitas pelaku wisata. | Peningkatan daya saing destinasi, pemerataan kunjungan, dan pengembangan desa wisata.                                  | Tinggi pada kebijakan daerah, promosi, dan program pembinaan.                           |
| Badan Otorita Borobudur/BOB                      | Lembaga pengelola/koordinatif kawasan | Melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan pengembangan kawasan pariwisata Borobudur.                                           | Penguatan destinasi prioritas, integrasi program, peningkatan kualitas kawasan, dan pemberdayaan masyarakat penyangga. | Tinggi pada koordinasi lintas lembaga dan arah kebijakan kawasan.                       |



| Stakeholder                               | Kategori                          | Peran Utama                                                                                                               | Kepentingan                                                                                  | Tingkat Pengaruh                                                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masyarakat lokal Kecamatan Borobudur      | Penerima manfaat dan pelaku lokal | Menjadi pelaku UMKM, tenaga kerja, pengelola atraksi, pelaku budaya, pemilik lahan, dan penjaga lingkungan sosial-budaya. | Peningkatan kesejahteraan, pemerataan manfaat, perlindungan budaya, dan kualitas lingkungan. | Tinggi secara sosial, tetapi pengaruh formal masih bergantung pada pelibatan dalam perencanaan. |
| Komunitas seni/budaya dan kelompok pemuda | Komunitas lokal                   | Mengelola kesenian, event budaya, promosi kreatif, dan aktivitas sosial desa.                                             | Pelestarian budaya, ruang tampil, dukungan promosi, dan regenerasi pelaku budaya.            | Sedang; penting dalam menjaga identitas budaya dan daya tarik wisata.                           |

Sumber: Hasil Analisis Penulis berdasarkan Wawancara, Kuesioner, dan Dokumen Penelitian, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata Kecamatan Borobudur tidak dapat hanya bergantung pada satu aktor. Pemerintah desa dan Pokdarwis memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dan BOB memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan dan program, sedangkan pelaku UMKM, homestay, komunitas budaya, dan masyarakat lokal menjadi pelaku utama yang menerima dampak langsung dari kegiatan wisata. Dengan demikian, tata kelola wisata Borobudur perlu diarahkan pada pola kolaboratif yang mempertemukan aktor kebijakan dengan aktor lokal.

#### 4.4.2 Persepsi Masyarakat terhadap Peran dan Kolaborasi Stakeholder

Persepsi masyarakat terhadap peran stakeholder digunakan untuk melihat aktor mana yang dianggap paling berpengaruh dalam pengembangan wisata desa. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku UMKM, BOB, serta Dinas/Pemkab/lainnya sama-sama dipandang memiliki peran, meskipun tingkat pengaruhnya berbeda.

**Tabel 4. 37 Pihak yang Paling Berperan dalam Pengembangan Wisata Desa**

| Jawaban         | Frekuensi | Persentase |
|-----------------|-----------|------------|
| Pemerintah desa | 31        | 31%        |
| Pokdarwis       | 22        | 22%        |

| Jawaban              | Frekuensi | Persentase |
|----------------------|-----------|------------|
| BOB                  | 15        | 15%        |
| Pelaku UMKM          | 18        | 18%        |
| Dinas/Pemkab/lainnya | 14        | 14%        |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, pemerintah desa dipilih oleh 31 responden sebagai pihak paling berperan dalam pengembangan wisata desa. Pokdarwis dipilih oleh 22 responden, pelaku UMKM oleh 18 responden, BOB oleh 15 responden, dan Dinas/Pemkab/lainnya oleh 14 responden. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang pemerintah desa sebagai aktor terdekat dalam pengembangan wisata, sedangkan Pokdarwis dan pelaku UMKM menjadi aktor operasional yang berhubungan langsung dengan aktivitas wisata lokal.

**Tabel 4. 38 Tingkat Kolaborasi Antar Stakeholder**

| Jawaban     | Frekuensi | Persentase |
|-------------|-----------|------------|
| Sangat baik | 8         | 8%         |
| Baik        | 42        | 42%        |
| Cukup       | 39        | 39%        |
| Buruk       | 11        | 11%        |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 8 responden menilai kolaborasi antar stakeholder sangat baik dan 42 responden menilai baik. Namun, 39 responden menilai kolaborasi masih cukup dan 11 responden menilai buruk. Artinya, kerja sama antar aktor sudah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini sejalan dengan wawancara yang menunjukkan bahwa pengembangan wisata desa membutuhkan koordinasi lebih kuat antara pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku UMKM, pemilik homestay, Dinas Pariwisata, BOB, dan masyarakat.

**Tabel 4. 39 Manfaat Program BOB atau Desa Wisata bagi Masyarakat**

| Jawaban           | Frekuensi | Persentase |
|-------------------|-----------|------------|
| Sangat bermanfaat | 10        | 10%        |
| Bermanfaat        | 48        | 48%        |
| Kurang bermanfaat | 32        | 32%        |
| Tidak bermanfaat  | 10        | 10%        |

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuesioner Masyarakat, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, 10 responden menilai program BOB atau desa wisata sangat bermanfaat dan 48 responden menilai bermanfaat. Sementara itu, 32 responden menilai kurang bermanfaat dan 10 responden menilai tidak bermanfaat. Hasil ini menunjukkan bahwa program kelembagaan sudah dirasakan oleh sebagian

masyarakat, tetapi manfaatnya belum merata. Oleh karena itu, peran BOB, Dinas Pariwisata, pemerintah desa, dan Pokdarwis perlu diarahkan agar program pemberdayaan lebih menjangkau pelaku UMKM kecil, pemilik homestay, kelompok seni, pemuda, dan masyarakat desa penyangga.

#### 4.4.3 Pemetaan Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Pemetaan pengaruh dan kepentingan digunakan untuk mengetahui posisi stakeholder dalam pengembangan wisata. Stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan tinggi perlu dilibatkan secara intensif dalam perumusan strategi, sedangkan stakeholder dengan kepentingan tinggi tetapi pengaruh lebih rendah perlu diberdayakan agar tidak hanya menjadi penerima dampak. Pemetaan ini penting karena pengembangan wisata berbasis masyarakat menuntut adanya pembagian peran yang jelas antara pengambil kebijakan, pengelola, dan masyarakat lokal.

**Tabel 4. 40 Pemetaan Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder**

| <b>Kuadran Stakeholder</b>                     | <b>Aktor</b>                                                                                         | <b>Makna Posisi</b>                                                                                                                         | <b>Arahan Pelibatan</b>                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengaruh tinggi –<br>kepentingan tinggi        | Badan Otorita Borobudur, Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa Borobudur/desa terkait | Aktor kunci dalam kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi program pengembangan wisata.                                             | Dilibatkan sebagai pengarah, koordinator, dan penyedia dukungan program.                         |
| Pengaruh sedang/tinggi –<br>kepentingan tinggi | Pokdarwis, pengelola desa wisata, komunitas budaya                                                   | Aktor operasional yang mengelola atraksi, paket wisata, kegiatan budaya, dan interaksi langsung dengan wisatawan.                           | Diperkuat kapasitas kelembagaan, promosi, dan manajemen destinasi.                               |
| Pengaruh sedang –<br>kepentingan tinggi        | Pelaku UMKM, pemilik homestay, pelaku kuliner, jasa transportasi wisata                              | Aktor ekonomi lokal yang memperoleh manfaat langsung dari aktivitas wisata tetapi masih memiliki keterbatasan modal, promosi, dan jaringan. | Diberdayakan melalui pelatihan, akses pasar, modal, promosi digital, dan integrasi paket wisata. |
| Pengaruh rendah/sedang –<br>kepentingan tinggi | Masyarakat lokal, petani, pemuda, kelompok perempuan                                                 | Penerima manfaat sekaligus kelompok terdampak oleh perubahan sosial, ekonomi, lahan, dan lingkungan.                                        | Perlu dilibatkan dalam musyawarah, monitoring, dan pembagian manfaat wisata.                     |

| Kuadran Stakeholder                  | Aktor                                                                  | Makna Posisi                                                                        | Arahan Pelibatan                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pengaruh sedang – kepentingan sedang | Komunitas pendukung, akademisi, media/promotor wisata, biro perjalanan | Aktor pendukung dalam promosi, riset, pendampingan, dan penghubung pasar wisatawan. | Dilibatkan sebagai mitra promosi, pendampingan, dan pengembangan produk wisata. |

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan pemetaan tersebut, BOB, Dinas Pariwisata, dan pemerintah desa merupakan aktor dengan pengaruh tinggi karena memiliki kewenangan program, kebijakan, dan koordinasi. Sementara itu, Pokdarwis, pelaku UMKM, homestay, komunitas budaya, dan masyarakat lokal memiliki kepentingan tinggi karena berhubungan langsung dengan aktivitas wisata dan dampaknya. Oleh karena itu, strategi pengembangan perlu menghindari pola top-down yang hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima program. Sebaliknya, masyarakat perlu ditempatkan sebagai aktor yang ikut merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan wisata.

#### 4.4.4 Analisis CATWOE Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat

Analisis CATWOE digunakan untuk memahami sistem pengembangan wisata Borobudur secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, sistem yang dianalisis adalah proses perubahan dari pengembangan wisata yang masih terkonsentrasi pada kawasan inti dan belum merata manfaatnya, menuju pengembangan wisata berbasis masyarakat yang memperluas manfaat ekonomi lokal, menjaga budaya, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

- *Attraction* → *Customer & Actor*
- *CBT* → *Actor & Transformation*
- *Ekonomi* → *Transformation*
- *Lingkungan* → *Environmental Constraints*

**Tabel 4. 41 Analisis CATWOE Pengembangan Wisata Borobudur Berbasis Masyarakat**

| Elemen CATWOE | Hasil Identifikasi                                                                                                        | Makna terhadap Pengembangan Wisata                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Customer      | Masyarakat lokal Kecamatan Borobudur, pelaku UMKM, pemilik homestay, wisatawan, pemerintah desa, dan generasi muda lokal. | Pihak yang menerima manfaat atau dampak dari pengembangan wisata. Masyarakat memperoleh peluang ekonomi, wisatawan memperoleh pengalaman |

| Elemen CATWOE             | Hasil Identifikasi                                                                                                                                                             | Makna terhadap Pengembangan Wisata                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                | wisata, sedangkan desa memperoleh penguatan ekonomi lokal.                                                                                                        |
| Actor                     | Pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku UMKM, pemilik homestay, Dinas Pariwisata, BOB, komunitas budaya, dan masyarakat lokal.                                                      | Pihak yang menjalankan proses pengembangan wisata, mulai dari pengelolaan atraksi, pelayanan wisata, promosi, pelatihan, hingga koordinasi program.               |
| Transformation            | Perubahan dari pengembangan wisata yang terkonsentrasi pada kawasan inti Candi Borobudur menjadi pengembangan wisata berbasis masyarakat yang tersebar ke desa-desa penyangga. | Transformasi diarahkan agar manfaat ekonomi tidak hanya berada di kawasan inti, tetapi juga menguatkan UMKM, homestay, budaya lokal, agrowisata, dan desa wisata. |
| Weltanschauung            | Pandangan bahwa pariwisata Borobudur harus menjadi sarana penguatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.                                           | Pengembangan wisata tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan kawasan.                                |
| Owner                     | Pemerintah daerah, BOB, pemerintah desa, dan lembaga pengelola kawasan/destinasi.                                                                                              | Pihak yang memiliki kewenangan dalam mengarahkan, mengatur, mendukung, atau membatasi proses pengembangan wisata.                                                 |
| Environmental Constraints | Regulasi cagar budaya dan tata ruang, daya dukung lingkungan, keterbatasan lahan, kondisi topografi, curah hujan, kapasitas SDM, modal UMKM, dan koordinasi kelembagaan.       | Batasan eksternal dan internal yang harus dipertimbangkan agar pengembangan wisata tidak merusak lingkungan, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat.             |

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026

Hasil CATWOE menunjukkan bahwa inti perubahan yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata Borobudur adalah pergeseran dari orientasi wisata yang terpusat pada kawasan inti menuju sistem wisata yang lebih menyebar, partisipatif, dan berbasis masyarakat. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi pihak terdampak, tetapi juga menjadi aktor dalam penyediaan produk wisata, pengelolaan atraksi, penguatan UMKM, homestay, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan. Transformasi tersebut membutuhkan dukungan pemilik kebijakan seperti BOB, pemerintah daerah,

dan pemerintah desa agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih sistematis.

#### 4.4.5 Sintesis Peran Stakeholder terhadap Pengembangan Wisata

Sintesis peran stakeholder menunjukkan bahwa pengembangan wisata Kecamatan Borobudur membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah dan BOB berperan pada kebijakan, koordinasi, fasilitasi, dan promosi kawasan. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara program pengembangan wisata dan kebutuhan masyarakat. Pokdarwis berperan sebagai pengelola operasional desa wisata. Pelaku UMKM dan homestay berperan dalam penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, masyarakat lokal dan komunitas budaya berperan menjaga identitas sosial budaya dan kualitas lingkungan.

**Tabel 4. 42 Sintesis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Borobudur**

| Stakeholder                           | Peran Strategis                                                                      | Arahan Penguatan Peran                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOB dan Dinas Pariwisata              | Koordinator kebijakan, fasilitator program, promosi destinasi, peningkatan kapasitas | Penguatan koordinasi lintas lembaga, pelatihan SDM, promosi desa wisata, dan fasilitasi program UMKM/homestay |
| Pemerintah Desa                       | Pengambil keputusan lokal, penghubung program, penggerak masyarakat                  | Musyawarah desa wisata, pemetaan pelaku lokal, dukungan regulasi desa, dan penataan aktivitas wisata          |
| Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata       | Pengelola atraksi, paket wisata, event, dan pelayanan wisata desa                    | Peningkatan kapasitas manajemen destinasi, promosi digital, penyusunan paket wisata antardesa                 |
| Pelaku UMKM dan Homestay              | Penyedia produk, kuliner, akomodasi, dan jasa wisata                                 | Kurasi produk, peningkatan kualitas layanan, akses modal, pemasaran digital, integrasi ke paket wisata        |
| Masyarakat Lokal dan Komunitas Budaya | Pelaku budaya, penjaga lingkungan, penerima manfaat, dan sumber identitas lokal      | Pelibatan dalam perencanaan, pembagian manfaat, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan                |

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Berdasarkan sintesis tersebut, strategi pengembangan wisata Borobudur perlu menempatkan stakeholder lokal sebagai bagian utama dalam sistem pengelolaan. Peran BOB dan Dinas Pariwisata tetap penting sebagai pengarah dan fasilitator, tetapi keberhasilan pengembangan wisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada

kapasitas pemerintah desa, Pokdarwis, UMKM, homestay, komunitas budaya, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, hasil analisis stakeholder ini menjadi dasar untuk menyusun strategi pada tahap SWOT, terutama strategi yang berkaitan dengan kolaborasi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM, promosi desa wisata, dan pelestarian budaya-lingkungan.



**Gambar 4. 13 Keterlibatan Stakeholder Lokal dalam Pengembangan Wisata Borobudur**  
*Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2026*

#### **4.5 Analisis IFAS–EFAS dan SWOT**

Analisis IFAS–EFAS dan SWOT disusun untuk menjawab sasaran keempat penelitian, yaitu merumuskan strategi pengembangan pariwisata Kecamatan Borobudur berbasis masyarakat guna mendukung penguatan ekonomi lokal. Analisis ini menggunakan hasil 4.1 sebagai dasar kondisi eksisting, hasil 4.2 sebagai dasar identifikasi potensi dan permasalahan, serta hasil 4.3 sebagai dasar pemetaan peran stakeholder. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan tidak hanya bersifat umum, tetapi disusun berdasarkan kondisi internal, kondisi eksternal, dan kebutuhan kolaborasi antar pemangku kepentingan di Kecamatan Borobudur.

Matriks IFAS digunakan untuk menilai faktor internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, sedangkan matriks EFAS digunakan untuk menilai faktor eksternal yang terdiri atas peluang dan ancaman. Bobot diberikan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing faktor terhadap pengembangan wisata, dengan total bobot sebesar 1,00. Rating diberikan pada skala 1 sampai 4, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi atau respons yang lebih kuat. Skor diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dan rating.

Analisis IFAS–EFAS dalam penelitian ini disusun berdasarkan integrasi komponen 4A (*attraction, accessibility, amenities, ancillary*), pendekatan Community Based Tourism (CBT), serta kondisi ekonomi lokal dan lingkungan. Dengan demikian, faktor internal dan eksternal tidak hanya dilihat secara umum, tetapi dikaitkan dengan sistem pengembangan wisata berbasis masyarakat di Kecamatan Borobudur.

#### 4.5.1 Matriks IFAS Pengembangan Wisata Borobudur

Faktor internal dalam pengembangan wisata Kecamatan Borobudur mencakup kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Kekuatan utama kawasan terletak pada keberadaan Candi Borobudur, budaya lokal, lanskap perdesaan, basis UMKM/homestay, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran lokal. Sementara itu, kelemahan utama berkaitan dengan belum optimalnya pelibatan masyarakat, ketimpangan fasilitas, kendala UMKM, konsentrasi manfaat wisata, dan pengelolaan lingkungan yang belum konsisten.

**Tabel 4. 43 Matriks IFAS Pengembangan Wisata Kecamatan Borobudur**

| Kode | Kategori | Faktor Strategis Internal                                                                                                                     | Bobot | Rating | Skor | Dasar Temuan                                                                      |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| S1   | Kekuatan | Keberadaan Candi Borobudur sebagai daya tarik utama wisata budaya dan sejarah berskala nasional-internasional.                                | 0,12  | 4      | 0,48 | Kondisi destinasi utama dan status Borobudur sebagai pusat daya tarik kawasan.    |
| S2   | Kekuatan | Budaya/kesenian lokal menjadi potensi wisata terbesar menurut 34 responden dan budaya lokal dinilai terjaga/sangat terjaga oleh 80 responden. | 0,10  | 4      | 0,40 | Kuesioner masyarakat dan pembahasan potensi budaya.                               |
| S3   | Kekuatan | Lanskap perdesaan, sawah, kebun, tegalan, dan Perbukitan Menoreh mendukung wisata alam, agrowisata, dan wisata pedesaan.                      | 0,09  | 3      | 0,27 | Analisis topografi, penggunaan lahan, dan potensi lanskap.                        |
| S4   | Kekuatan | Terdapat basis UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, perdagangan, dan jasa wisata sebagai                                                       | 0,10  | 3      | 0,30 | Kuesioner: 46 responden memiliki usaha wisata dan 61 responden menilai pariwisata |



| Kode         | Kategori  | Faktor Strategis Internal                                                      | Bobot       | Rating | Skor        | Dasar Temuan                                                                                                                  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | penggerak ekonomi lokal.                                                       |             |        |             | meningkatkan pendapatan.                                                                                                      |
| S5           | Kekuatan  | Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran lokal relatif tinggi.           | 0,08        | 3      | 0,24        | Kuesioner: 97 responden menilai peran masyarakat penting/sangat penting.                                                      |
| W1           | Kelemahan | Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan belum optimal.                       | 0,10        | 2      | 0,20        | Kuesioner: 30 responden jarang dan 17 responden tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan.                                    |
| W2           | Kelemahan | Fasilitas dan infrastruktur pendukung wisata belum merata antar desa.          | 0,11        | 2      | 0,22        | Kuesioner: 39 responden menilai fasilitas cukup, 11 buruk, dan 66 masih merasakan kendala infrastruktur sering/kadang-kadang. |
| W3           | Kelemahan | Pelaku UMKM menghadapi kendala modal, promosi, pelatihan, dan akses wisatawan. | 0,10        | 2      | 0,20        | Kuesioner dan temuan pengembangan UMKM.                                                                                       |
| W4           | Kelemahan | Manfaat wisata masih terkonsentrasi pada kawasan inti dan koridor akses utama. | 0,10        | 2      | 0,20        | Analisis aksesibilitas, persebaran kegiatan wisata, dan kuesioner kunjungan wisatawan ke desa.                                |
| W5           | Kelemahan | Pengelolaan lingkungan belum konsisten dalam aktivitas wisata.                 | 0,10        | 2      | 0,20        | Kuesioner: 28 responden menilai kegiatan wisata jarang memperhatikan lingkungan dan 10 tidak pernah.                          |
| <b>Total</b> |           |                                                                                | <b>1,00</b> |        | <b>2,71</b> |                                                                                                                               |

Sumber: Hasil Analisis Penulis berdasarkan Kuesioner, Temuan Lapangan, dan Pembahasan 4.1–4.3, 2026

Berdasarkan matriks IFAS, total skor faktor internal pengembangan wisata Kecamatan Borobudur adalah 2,71. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi internal kawasan berada pada kategori cukup kuat karena melebihi nilai tengah 2,50. Subtotal skor kekuatan sebesar 1,69 lebih tinggi dibandingkan subtotal skor kelemahan sebesar 1,02. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Borobudur memiliki modal internal yang kuat untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat, namun tetap

memerlukan perbaikan pada aspek pemerataan manfaat, infrastruktur lokal, penguatan UMKM, dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan.

#### 4.5.2 Matriks EFAS Pengembangan Wisata Borobudur

Faktor eksternal dalam pengembangan wisata Kecamatan Borobudur mencakup peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus diantisipasi. Peluang utama berasal dari posisi Borobudur sebagai destinasi prioritas nasional, citra budaya berskala internasional, tren wisata berbasis pengalaman, promosi digital, serta potensi kolaborasi stakeholder. Ancaman utama mencakup kerusakan lingkungan, keterbatasan lahan, komersialisasi budaya, persaingan antar desa wisata, risiko fisik wilayah, dan belum meratanya manfaat program.

**Tabel 4. 44 Matriks EFAS Pengembangan Wisata Kecamatan Borobudur**

| Kode | Kategori | Faktor Strategis Eksternal                                                                                                           | Bobot | Rating | Skor | Dasar Temuan                                           |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------|
| O1   | Peluang  | Borobudur menjadi destinasi prioritas nasional dan memperoleh dukungan kebijakan/kelembagaan dari pemerintah dan BOB.                | 0,11  | 4      | 0,44 | Konteks DPSP, BOB, dan kebijakan pengembangan kawasan. |
| O2   | Peluang  | Status Borobudur sebagai destinasi budaya berskala internasional membuka peluang pasar wisata budaya, religi, edukasi, dan heritage. | 0,09  | 4      | 0,36 | Kondisi destinasi budaya dan status warisan budaya.    |
| O3   | Peluang  | Tren wisata berbasis pengalaman, desa wisata, ekowisata, dan agrowisata sesuai dengan karakter Kecamatan Borobudur.                  | 0,09  | 3      | 0,27 | Potensi lanskap, budaya, pertanian, dan desa wisata.   |
| O4   | Peluang  | Promosi digital, paket wisata antardesa, dan platform informasi daerah dapat memperluas akses pasar UMKM dan desa wisata.            | 0,08  | 3      | 0,24 | Temuan kendala promosi dan peluang pemasaran digital.  |
| O5   | Peluang  | Kolaborasi stakeholder berpotensi diperkuat karena terdapat                                                                          | 0,08  | 3      | 0,24 | Hasil analisis stakeholder/CATWOE.                     |

| Kode         | Kategori | Faktor Strategis Eksternal                                                                                                      | Bobot       | Rating | Skor        | Dasar Temuan                                                                      |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | pemerintah desa, Pokdarwis, BOB, Pemkab, UMKM, homestay, komunitas lokal, dan masyarakat.                                       |             |        |             |                                                                                   |
| T1           | Ancaman  | Kerusakan lingkungan menjadi ancaman utama dalam pengembangan wisata.                                                           | 0,11        | 2      | 0,22        | Kuesioner: 36 responden memilih kerusakan lingkungan sebagai ancaman terbesar.    |
| T2           | Ancaman  | Keterbatasan lahan dan potensi alih fungsi lahan dapat mengurangi karakter agraris dan lanskap budaya Borobudur.                | 0,10        | 2      | 0,20        | Peta penggunaan lahan dan kuesioner ancaman keterbatasan lahan.                   |
| T3           | Ancaman  | Komersialisasi budaya berpotensi menurunkan keaslian nilai budaya lokal.                                                        | 0,09        | 2      | 0,18        | Kuesioner: 20 responden memilih komersialisasi budaya sebagai ancaman.            |
| T4           | Ancaman  | Persaingan antar desa wisata dapat terjadi apabila pengembangan tidak terkoordinasi.                                            | 0,07        | 2      | 0,14        | Kuesioner dan hasil analisis stakeholder.                                         |
| T5           | Ancaman  | Kondisi topografi berbukit dan curah hujan tinggi meningkatkan risiko longsor, erosi, dan gangguan akses pada beberapa wilayah. | 0,09        | 2      | 0,18        | Analisis topografi, curah hujan, dan aksesibilitas.                               |
| T6           | Ancaman  | Dukungan program belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat dan pelaku usaha lokal.                                         | 0,09        | 2      | 0,18        | Kuesioner: 41 responden merasa kurang/tidak terbantu oleh program pemerintah/BOB. |
| <b>Total</b> |          |                                                                                                                                 | <b>1,00</b> |        | <b>2,65</b> |                                                                                   |

Sumber: Hasil Analisis Penulis berdasarkan Kuesioner, Temuan Lapangan, dan Pembahasan 4.1–4.3, 2026

Berdasarkan matriks EFAS, total skor faktor eksternal pengembangan wisata Kecamatan Borobudur adalah 2,65. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peluang eksternal masih dapat dimanfaatkan secara cukup baik, meskipun kawasan juga menghadapi sejumlah ancaman yang perlu dikendalikan. Subtotal skor peluang sebesar 1,55 lebih tinggi dibandingkan subtotal skor ancaman sebesar 1,10. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata Borobudur memiliki kesempatan untuk

diperkuat melalui dukungan kebijakan, pengembangan desa wisata, promosi digital, dan kolaborasi stakeholder, tetapi perlu tetap memperhatikan batasan lingkungan, tata ruang, dan pelestarian budaya.

#### 4.5.3 Penentuan Posisi Strategis Berdasarkan IFAS–EFAS

Penentuan posisi strategis dilakukan dengan membandingkan subtotal skor kekuatan dan kelemahan pada IFAS serta subtotal skor peluang dan ancaman pada EFAS. Sumbu horizontal diperoleh dari selisih skor kekuatan dan kelemahan, sedangkan sumbu vertikal diperoleh dari selisih skor peluang dan ancaman. Hasil perhitungan posisi strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 45 Penentuan Posisi Strategis Berdasarkan IFAS–EFAS**

| <b>Komponen</b>         | <b>Nilai</b>     | <b>Keterangan</b>                                                          |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal Kekuatan (S)   | 1,69             | Akumulasi skor kekuatan internal                                           |
| Subtotal Kelemahan (W)  | 1,02             | Akumulasi skor kelemahan internal                                          |
| Koordinat X = S - W     | 0,67             | Nilai positif menunjukkan kekuatan lebih dominan dibanding kelemahan       |
| Subtotal Peluang (O)    | 1,55             | Akumulasi skor peluang eksternal                                           |
| Subtotal Ancaman (T)    | 1,10             | Akumulasi skor ancaman eksternal                                           |
| Koordinat Y = O - T     | 0,45             | Nilai positif menunjukkan peluang lebih dominan dibanding ancaman          |
| <b>Posisi Strategis</b> | <b>Kuadran I</b> | <b>Strategi pertumbuhan/pengembangan dengan pengendalian keberlanjutan</b> |

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koordinat strategis pengembangan wisata Kecamatan Borobudur berada pada nilai X sebesar 0,67 dan Y sebesar 0,45. Kedua nilai tersebut bernilai positif, sehingga posisi strategi berada pada Kuadran I. Posisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Borobudur memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan wisata. Namun, karena kawasan Borobudur juga memiliki ancaman lingkungan, keterbatasan lahan, dan isu pelestarian budaya, strategi pertumbuhan yang dipilih tidak boleh

diarahkan pada pariwisata massal semata, melainkan pada pertumbuhan selektif, terkendali, dan berbasis masyarakat.

#### 4.5.4 Matriks SWOT Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat

Matriks SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi berdasarkan kombinasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi SO diarahkan untuk memanfaatkan kekuatan internal dalam menangkap peluang eksternal. Strategi ST diarahkan untuk menggunakan kekuatan internal dalam menghadapi ancaman. Strategi WO diarahkan untuk memanfaatkan peluang eksternal guna mengatasi kelemahan internal. Sementara itu, strategi WT diarahkan untuk meminimalkan kelemahan sekaligus mengurangi dampak ancaman.

**Tabel 4. 46 Matriks SWOT Pengembangan Wisata Kecamatan Borobudur**

| <b>Jenis Strategi</b> | <b>Logika Strategi</b>                            | <b>Rumusan Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategi SO           | Memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang     | Mengembangkan paket wisata budaya–desa wisata–UMKM berbasis masyarakat dengan memanfaatkan daya tarik Candi Borobudur, budaya lokal, lanskap perdesaan, homestay, dan dukungan DPSP/BOB; memperkuat promosi digital dan paket wisata antardesa agar kunjungan tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan inti. |
| Strategi ST           | Memanfaatkan kekuatan untuk mengendalikan ancaman | Menguatkan pengelolaan wisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pembatasan aktivitas pada area rentan, pengendalian alih fungsi lahan, dan edukasi lingkungan dengan melibatkan Pokdarwis, komunitas budaya, UMKM, dan masyarakat lokal.                                                            |
| Strategi WO           | Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan    | Meningkatkan kualitas infrastruktur lokal, fasilitas desa wisata, kapasitas UMKM/homestay, promosi digital, dan pelibatan masyarakat dengan memanfaatkan dukungan program pemerintah daerah, BOB, serta kolaborasi stakeholder.                                                                             |
| Strategi WT           | Meminimalkan kelemahan dan mengurangi ancaman     | Menyusun tata kelola kolaboratif dan mekanisme monitoring lingkungan-budaya untuk mengurangi ketimpangan manfaat, konflik antar desa wisata, kerusakan lingkungan, komersialisasi budaya, dan rendahnya partisipasi masyarakat.                                                                             |

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Berdasarkan matriks SWOT tersebut, strategi utama yang paling sesuai adalah strategi SO karena posisi IFAS–EFAS berada pada Kuadran I. Namun, strategi SO tetap perlu dilengkapi dengan strategi ST, WO, dan WT agar pengembangan wisata

tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, perlindungan budaya, dan pengendalian lingkungan.

#### 4.5.5 Sintesis Prioritas Strategi Pengembangan

Sintesis prioritas strategi disusun untuk menghubungkan hasil IFAS–EFAS, SWOT, dan analisis stakeholder. Prioritas strategi diarahkan pada pengembangan wisata berbasis masyarakat yang mampu memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan Kecamatan Borobudur.

**Tabel 4. 47 Sintesis Prioritas Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat**

| Prioritas | Arahan Strategi                                  | Basis SWOT | Bentuk Implementasi                                                                                                                                                                                 | Stakeholder Utama                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Pengembangan paket wisata terpadu antardesa      | SO         | Mengintegrasikan Candi Borobudur, desa wisata, budaya lokal, UMKM, homestay, agrowisata, dan lanskap perdesaan ke dalam paket wisata tematik.                                                       | Pokdarwis, pemerintah desa, Dinas Pariwisata, BOB, UMKM, homestay          |
| 2         | Penguatan UMKM, homestay, dan ekonomi lokal      | SO/WO      | Meningkatkan kualitas produk, kemasan, pemasaran digital, akses modal, pelatihan pelayanan wisata, dan keterhubungan UMKM dengan rute wisata.                                                       | Dinas Pariwisata, BOB, pemerintah desa, UMKM, pemilik homestay             |
| 3         | Pemerataan manfaat wisata ke desa-desa penyangga | WO         | Mendorong distribusi kunjungan melalui promosi desa wisata, event lokal, paket wisata antardesa, serta penguatan aksesibilitas dan fasilitas dasar.                                                 | Pemerintah desa, Pokdarwis, Dinas Pariwisata, BOB, komunitas lokal         |
| 4         | Penguatan tata kelola kolaboratif stakeholder    | WO/WT      | Membentuk koordinasi rutin antar pemerintah desa, Pokdarwis, BOB, Dinas Pariwisata, UMKM, homestay, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.                            | BOB, Dinas Pariwisata, pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat              |
| 5         | Perlindungan budaya dan pengendalian lingkungan  | ST/WT      | Menetapkan prinsip pengembangan wisata yang menjaga budaya lokal, mengendalikan komersialisasi budaya, membatasi pengembangan pada area rentan, serta memperkuat pengelolaan sampah dan lingkungan. | Pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas budaya, DLH, BOB, masyarakat |

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Prioritas strategi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata Kecamatan Borobudur perlu diarahkan pada pola pertumbuhan yang terkendali dan inklusif. Strategi tidak cukup hanya memperkuat daya tarik Candi Borobudur, tetapi juga harus memperluas keterlibatan desa-desa penyangga, meningkatkan kapasitas UMKM dan homestay, memperbaiki koordinasi stakeholder, serta menjaga budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, hasil analisis 4.4 menjadi dasar bagi penyusunan arahan strategi pengembangan pada subbab berikutnya.

Dengan demikian, strategi pengembangan wisata Kecamatan Borobudur tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisata, tetapi juga pada penguatan sistem 4A, pemberdayaan masyarakat melalui CBT, pemerataan ekonomi lokal, serta pengendalian dampak lingkungan secara berkelanjutan.

#### **4.6 Strategi Pengembangan Pariwisata Kecamatan Borobudur Berbasis Masyarakat Guna Mendukung Penguatan Ekonomi Lokal**

Subbab ini merupakan tahap perumusan strategi berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, potensi dan permasalahan, stakeholder, serta IFAS–EFAS dan SWOT. Strategi pengembangan dalam penelitian ini merupakan implementasi dari analisis 4A (*attraction, accessibility, amenities, ancillary*) yang diperkuat dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT), ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil analisis IFAS–EFAS menunjukkan bahwa posisi pengembangan wisata Kecamatan Borobudur berada pada Kuadran I, yaitu kondisi ketika kekuatan internal dan peluang eksternal lebih dominan dibandingkan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, strategi utama yang digunakan adalah strategi pertumbuhan dan pengembangan. Namun, karena Borobudur merupakan kawasan yang memiliki nilai budaya, sejarah, lingkungan, dan sosial yang tinggi, strategi pertumbuhan tersebut perlu diarahkan secara selektif, terkendali, dan berbasis masyarakat, bukan hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Strategi pengembangan dalam penelitian ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan desa wisata, UMKM, homestay, atraksi budaya, agrowisata, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Kecamatan Borobudur diposisikan sebagai satu kesatuan kawasan studi, sehingga strategi tidak hanya berfokus pada kawasan inti Candi Borobudur, tetapi juga pada desa-desa penyangga dan wilayah perdesaan yang memiliki potensi budaya, ekonomi lokal, pertanian, lanskap, serta kelembagaan masyarakat.

#### 4.6.1 Arahkan Umum Strategi Pengembangan

Arahkan umum strategi disusun dengan menerjemahkan hasil SWOT menjadi rumusan kebijakan dan program pengembangan. Strategi SO menjadi arah utama karena posisi pengembangan berada pada Kuadran I, sedangkan strategi ST, WO, dan WT digunakan sebagai strategi pengendalian agar pengembangan tetap memperhatikan pemerataan manfaat, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian budaya.

**Tabel 4. 48 Arahkan Umum Strategi Berdasarkan Hasil SWOT**

| <b>Basis SWOT</b> | <b>Logika Strategi</b>                          | <b>Arahkan Strategi</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Orientasi Pengembangan</b>                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SO                | Memfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang     | Mengembangkan paket wisata terpadu berbasis desa, budaya lokal, UMKM, homestay, agrowisata, dan lanskap perdesaan dengan memanfaatkan daya tarik Candi Borobudur, dukungan DPSP/BOB, serta tren wisata berbasis pengalaman. | Pengembangan produk wisata dan perluasan manfaat ekonomi lokal |
| ST                | Memfaatkan kekuatan untuk mengendalikan ancaman | Menggunakan kekuatan budaya lokal, komunitas, Pokdarwis, dan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan komersialisasi budaya, tekanan lingkungan, alih fungsi lahan, dan risiko degradasi kawasan.                           | Perlindungan budaya, lingkungan, dan karakter perdesaan        |
| WO                | Memfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan    | Memfaatkan dukungan pemerintah, BOB, promosi digital, dan kolaborasi stakeholder untuk                                                                                                                                      | Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaku lokal |



| Basis SWOT | Logika Strategi                               | Arahan Strategi                                                                                                                                                                                    | Orientasi Pengembangan                                  |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                               | memperbaiki fasilitas, aksesibilitas lokal, kapasitas UMKM, homestay, dan pelibatan masyarakat.                                                                                                    |                                                         |
| WT         | Meminimalkan kelemahan dan mengurangi ancaman | Menyusun tata kelola kolaboratif, monitoring lingkungan-budaya, pengendalian pemanfaatan ruang, dan mekanisme pemerataan manfaat agar pengembangan tidak menimbulkan konflik dan ketimpangan baru. | Pengendalian pengembangan dan tata kelola berkelanjutan |

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, strategi pengembangan kawasan wisata Kecamatan Borobudur perlu menggabungkan orientasi pertumbuhan ekonomi dengan prinsip pengendalian. Pertumbuhan ekonomi lokal diarahkan melalui pengembangan produk wisata, UMKM, homestay, dan paket wisata desa. Sementara itu, prinsip pengendalian diarahkan melalui pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, pengaturan ruang, serta penguatan tata kelola antar stakeholder.

#### 4.6.2 Strategi Pengembangan Produk Wisata Terpadu Berbasis Desa dan Budaya Lokal

Strategi pertama adalah mengembangkan produk wisata terpadu berbasis desa dan budaya lokal. Strategi ini penting karena hasil analisis menunjukkan bahwa potensi budaya/kesenian, sejarah, lanskap perdesaan, pertanian, kuliner, dan UMKM merupakan kekuatan utama Kecamatan Borobudur. Produk wisata perlu disusun agar wisatawan tidak hanya berkunjung ke Candi Borobudur, tetapi juga bergerak ke desa-desa penyangga untuk menikmati pengalaman wisata budaya, kerajinan, kuliner, homestay, agrowisata, dan kehidupan perdesaan.

**Tabel 4. 49 Strategi Pengembangan Produk Wisata Terpadu Berbasis Desa**

| <b>Arahan Produk Wisata</b>            | <b>Bentuk Pengembangan</b>                                                                                        | <b>Manfaat terhadap Ekonomi Lokal</b>                                                                   | <b>Stakeholder Pelaksana</b>                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Paket wisata budaya dan sejarah        | Atraksi budaya, kesenian lokal, narasi sejarah Borobudur, kegiatan edukasi budaya, dan kunjungan ke desa wisata.  | Wisatawan memperoleh pengalaman budaya yang lebih lengkap dan masyarakat memperoleh ruang ekonomi baru. | Pokdarwis, komunitas budaya, pemerintah desa, Dinas Pariwisata |
| Paket wisata desa dan homestay         | Pengalaman tinggal di rumah masyarakat, aktivitas harian desa, kuliner lokal, kerajinan, dan tur lingkungan desa. | Meningkatkan lama tinggal wisatawan dan pendapatan keluarga pemilik homestay.                           | Pemilik homestay, Pokdarwis, pemerintah desa, BOB              |
| Paket agrowisata dan lanskap perdesaan | Kunjungan sawah, kebun, tegalan, kegiatan pertanian, jalur sepeda/jalan kaki, dan titik pandang lanskap Menoreh.  | Memperluas manfaat wisata ke wilayah perdesaan dan mempertahankan karakter agraris Borobudur.           | Kelompok tani, Pokdarwis, pemerintah desa, masyarakat          |
| Paket UMKM dan kuliner lokal           | Kunjungan produksi kerajinan, kuliner, pasar lokal, workshop produk, dan penjualan suvenir berbasis desa.         | Meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas akses pasar UMKM.                                 | Pelaku UMKM, pemerintah desa, Dinas Pariwisata, BOB            |
| Paket wisata antardesa                 | Integrasi beberapa desa wisata dalam satu rute tematik, misalnya budaya–kuliner–homestay–agrowisata.              | Mengurangi konsentrasi kunjungan pada kawasan inti dan mendorong pemerataan manfaat ekonomi.            | Pokdarwis antardesa, Dinas Pariwisata, BOB, biro perjalanan    |

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Pengembangan produk wisata terpadu perlu dikemas dalam bentuk rute atau paket yang jelas agar mudah dipasarkan kepada wisatawan. Paket wisata tidak hanya menawarkan objek, tetapi juga pengalaman. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan sebagai pemandu lokal, penyedia homestay, pelaku kuliner, pengrajin, pengelola atraksi, dan penyedia jasa pendukung. Pola ini sejalan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat karena masyarakat lokal ditempatkan sebagai pelaku utama dalam rantai nilai pariwisata.

#### **4.6.3 Strategi Penguatan Ekonomi Lokal, UMKM, dan Homestay**

Strategi kedua adalah memperkuat ekonomi lokal melalui UMKM, kuliner, kerajinan, jasa wisata, dan homestay. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki usaha yang berhubungan dengan pariwisata, tetapi masih

menghadapi kendala promosi, modal, pelatihan, akses wisatawan, dan keterhubungan dengan paket wisata. Oleh karena itu, strategi penguatan ekonomi lokal perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, kualitas produk, akses pasar, serta integrasi UMKM dan homestay ke dalam sistem wisata Borobudur.

**Tabel 4. 50 Strategi Penguatan Ekonomi Lokal, UMKM, dan Homestay**

| <b>Arahan Strategi</b>                      | <b>Bentuk Program</b>                                                                                                              | <b>Dampak yang Diharapkan</b>                                                           | <b>Stakeholder Pelaksana</b>                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas produk UMKM            | Pelatihan desain produk, kemasan, standar kualitas, higienitas kuliner, dan identitas produk lokal.                                | Produk lokal lebih kompetitif dan memiliki nilai jual lebih tinggi.                     | Dinas terkait, BOB, pemerintah desa, pelaku UMKM  |
| Pemasaran digital dan katalog produk wisata | Pembuatan katalog digital UMKM/homestay, promosi media sosial, platform pemesanan, dan integrasi dengan website/promosi destinasi. | Akses pasar UMKM dan homestay meningkat, tidak hanya bergantung pada kunjungan spontan. | Dinas Pariwisata, BOB, Pokdarwis, pelaku UMKM     |
| Integrasi UMKM ke paket wisata              | Produk UMKM dimasukkan sebagai bagian dari rute wisata, workshop, suvenir wajib, atau titik kunjungan wisata.                      | Belanja wisatawan lebih banyak terserap oleh pelaku lokal.                              | Pokdarwis, biro perjalanan, UMKM, pemerintah desa |
| Penguatan homestay berbasis standar layanan | Pelatihan pelayanan tamu, kebersihan, keamanan, storytelling lokal, dan pengelolaan reservasi.                                     | Meningkatkan lama tinggal wisatawan dan pendapatan rumah tangga.                        | Pemilik homestay, Pokdarwis, Dinas Pariwisata     |
| Akses pembiayaan dan pendampingan usaha     | Fasilitasi permodalan mikro, koperasi/BUMDes, pendampingan legalitas, dan pencatatan keuangan sederhana.                           | UMKM dan homestay memiliki kapasitas tumbuh yang lebih stabil.                          | Pemerintah desa, BUMDes, Dinas Koperasi/UMKM, BOB |

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Strategi penguatan ekonomi lokal perlu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi tenaga pendukung, tetapi juga menjadi pemilik manfaat ekonomi. Oleh karena itu, UMKM dan homestay harus dihubungkan dengan paket wisata, promosi destinasi, dan kelembagaan desa wisata. Penguatan ini juga dapat dilakukan melalui

peran BUMDes atau koperasi lokal sebagai pengelola bersama, sehingga manfaat ekonomi dapat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan secara lebih adil.

#### 4.6.4 Strategi Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Stakeholder

Strategi ketiga adalah memperkuat kelembagaan dan kolaborasi stakeholder. Hasil analisis stakeholder dan CATWOE menunjukkan bahwa pengembangan wisata Borobudur melibatkan banyak aktor, antara lain pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku UMKM, homestay, Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, BOB, komunitas budaya, dan masyarakat lokal. Karena itu, strategi pengembangan tidak akan efektif apabila setiap aktor berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi yang jelas agar program pengembangan wisata, pemberdayaan masyarakat, promosi, dan pengendalian kawasan dapat berjalan terpadu.

**Tabel 4. 51 Strategi Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Stakeholder**

| Arahan Strategi                               | Bentuk Program                                                                                                            | Dampak yang Diharapkan                                                       | Stakeholder Utama                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Forum koordinasi stakeholder Borobudur        | Membentuk forum rutin antara BOB, Dinas Pariwisata, pemerintah desa, Pokdarwis, UMKM, homestay, dan komunitas lokal.      | Koordinasi program lebih jelas dan mengurangi tumpang tindih kegiatan.       | BOB, Dinas Pariwisata, pemerintah desa     |
| Musyawarah desa wisata berbasis masyarakat    | Melibatkan masyarakat dalam perencanaan atraksi, event, penggunaan dana, pembagian manfaat, dan evaluasi kegiatan wisata. | Partisipasi masyarakat meningkat dan keputusan lebih sesuai kebutuhan lokal. | Pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat     |
| Penguatan Pokdarwis dan pengelola desa wisata | Pelatihan manajemen destinasi, promosi, pelayanan, pencatatan kunjungan, dan pengelolaan paket wisata.                    | Kelembagaan lokal lebih profesional dan mandiri.                             | Dinas Pariwisata, BOB, Pokdarwis           |
| Kemitraan UMKM–homestay–biro perjalanan       | Membangun kerja sama pemasaran dan paket wisata antara pelaku lokal dan jejaring pasar wisata.                            | Produk lokal lebih mudah masuk ke pasar wisatawan.                           | UMKM, homestay, Pokdarwis, biro perjalanan |

| Arahan Strategi                     | Bentuk Program                                                                                                                    | Dampak yang Diharapkan                                              | Stakeholder Utama                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Monitoring dan evaluasi kolaboratif | Menyusun indikator sederhana seperti jumlah pelaku lokal terlibat, pendapatan UMKM, pemerataan kunjungan, dan kondisi lingkungan. | Pengembangan wisata dapat dievaluasi secara berkala dan transparan. | Pemerintah desa, BOB, Dinas Pariwisata, masyarakat |

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026

Penguatan kelembagaan menjadi kunci karena pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan kejelasan peran dan mekanisme kerja sama. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan masyarakat, Pokdarwis berperan sebagai pengelola operasional, Dinas Pariwisata dan BOB berperan sebagai fasilitator dan koordinator, sedangkan masyarakat, UMKM, homestay, dan komunitas budaya menjadi pelaku utama. Melalui kolaborasi tersebut, strategi pengembangan dapat mengurangi ketimpangan manfaat dan memperkuat posisi masyarakat lokal dalam sistem pariwisata Borobudur.

#### 4.6.5 Strategi Pengendalian Lingkungan Budaya dan Tata Ruang

Strategi keempat adalah pengendalian lingkungan, budaya, dan tata ruang. Pengembangan wisata Borobudur perlu memperhatikan daya dukung kawasan karena wilayah ini memiliki nilai budaya dan lanskap yang tinggi, serta sebagian wilayah memiliki kondisi topografi berbukit dan curah hujan yang perlu diantisipasi. Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, komersialisasi budaya, dan keterbatasan lahan. Oleh karena itu, strategi pengembangan perlu dilengkapi dengan prinsip pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan ruang kawasan.

**Tabel 4. 52 Strategi Pengendalian Lingkungan, Budaya, dan Tata Ruang**

| Arahan Pengendalian                   | Bentuk Program                                                                                                              | Dampak yang Diharapkan                                               | Stakeholder Utama                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pengendalian pemanfaatan ruang wisata | Mengarahkan kegiatan wisata intensif pada area yang memiliki akses dan fasilitas memadai, serta membatasi pengembangan pada | Mengurangi tekanan pada lahan, kawasan pertanian, dan area berisiko. | Pemerintah daerah, pemerintah desa, BOB |

| Arahan Pengendalian                          | Bentuk Program                                                                                                                       | Dampak yang Diharapkan                                                             | Stakeholder Utama                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                              | area rentan lingkungan.                                                                                                              |                                                                                    |                                                   |
| Pelestarian budaya lokal                     | Menyusun kode etik pertunjukan budaya, melibatkan komunitas budaya sebagai pemilik narasi, dan menghindari eksploitasi budaya.       | Budaya lokal tetap otentik dan tidak hanya menjadi komoditas wisata.               | Komunitas budaya, Pokdarwis, pemerintah desa      |
| Pengelolaan sampah dan lingkungan destinasi  | Penyediaan fasilitas sampah, edukasi wisatawan, pengelolaan kebersihan event, dan monitoring lingkungan desa wisata.                 | Kualitas lingkungan wisata meningkat dan risiko pencemaran berkurang.              | Pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, DLH       |
| Perlindungan lanskap perdesaan dan pertanian | Mendorong agrowisata tanpa mengubah fungsi lahan secara berlebihan serta menjaga sawah, kebun, dan ruang terbuka sebagai daya tarik. | Karakter agraris Borobudur tetap terjaga sekaligus memberi nilai ekonomi tambahan. | Kelompok tani, pemerintah desa, masyarakat        |
| Pengaturan kapasitas dan pola kunjungan      | Mengatur rute, jadwal, kapasitas kegiatan, serta distribusi wisatawan ke beberapa desa agar tidak menumpuk pada satu titik.          | Kunjungan lebih merata dan tekanan pada kawasan inti berkurang.                    | Dinas Pariwisata, BOB, Pokdarwis, biro perjalanan |

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026

Strategi pengendalian ini penting agar pengembangan wisata tidak menghilangkan karakter utama Borobudur sebagai kawasan budaya dan perdesaan. Pengembangan wisata yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan alih fungsi lahan, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, dan komersialisasi budaya. Oleh karena itu, pengembangan wisata perlu diarahkan pada prinsip konservasi, pembatasan area rentan, dan distribusi aktivitas wisata secara proporsional ke desa-desa yang memiliki kesiapan fasilitas dan kelembagaan.

#### 4.6.6 Arahana Spasial Pengembangan Kawasan Wisata Kecamatan Borobudur

Arahana spasial digunakan untuk menerjemahkan strategi ke dalam pola pengembangan ruang di Kecamatan Borobudur. Arahana ini disusun berdasarkan kondisi eksisting, potensi penggunaan lahan, aksesibilitas, karakter desa, keberadaan kawasan inti Candi Borobudur, desa wisata, serta kebutuhan pemerataan manfaat ekonomi. Arahana spasial tidak dimaksudkan untuk menggantikan dokumen tata ruang, melainkan sebagai rekomendasi pengembangan wisata berbasis hasil analisis penelitian.

Arahana zonasi pengembangan wisata disusun berdasarkan hasil sintesis kondisi eksisting, persebaran destinasi wisata, aksesibilitas, karakteristik wilayah, potensi ekonomi lokal, serta hasil analisis SWOT. Berdasarkan sintesis tersebut, wilayah Kecamatan Borobudur dikelompokkan menjadi tiga arahan pengembangan utama yaitu zona pusat pelayanan wisata, zona penguatan ekonomi lokal berbasis masyarakat, dan zona wisata alam-perdesaan.

**Tabel 4. 53 Arahana Spasial Pengembangan Kawasan Wisata Kecamatan Borobudur**

| <b>Arahana Zona</b>                                    | <b>Desa/Area Arahana</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Fungsi Pengembangan</b>                                                                                                                         | <b>Arahana Pengendalian</b>                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona inti warisan budaya dan pelayanan wisata utama    | Desa Borobudur dan Desa Tanjungsari. Desa Borobudur menjadi lokasi pusat daya tarik Candi Borobudur, sedangkan Tanjungsari diarahkan sebagai area pendukung langsung pelayanan, akses, dan aktivitas wisata sekitar kawasan inti. | Pusat daya tarik wisata, pelayanan informasi, simpul distribusi wisatawan, pusat aktivitas jasa wisata, dan penghubung menuju desa-desa penyangga. | Pengembangan harus sangat terkendali, tidak menambah tekanan berlebihan pada kawasan cagar budaya, serta diarahkan untuk mengalirkan kunjungan ke desa-desa sekitar. |
| Zona penyangga budaya, desa wisata, UMKM, dan homestay | Desa Wanurejo, Candirejo, Tuksongo, Wringinputih, Karanganyar, Kembanglimus, dan Bumiharjo. Desa-desa ini diarahkan sebagai ruang pengembangan atraksi budaya, kerajinan, kuliner, homestay, UMKM,                                | Pengembangan desa wisata, paket budaya, kerajinan, kuliner lokal, homestay, event desa, edukasi budaya, dan penguatan produk ekonomi masyarakat.   | Perlu penguatan Pokdarwis, promosi digital, standar pelayanan homestay, kurasi produk UMKM, dan integrasi dengan paket wisata kawasan inti.                          |

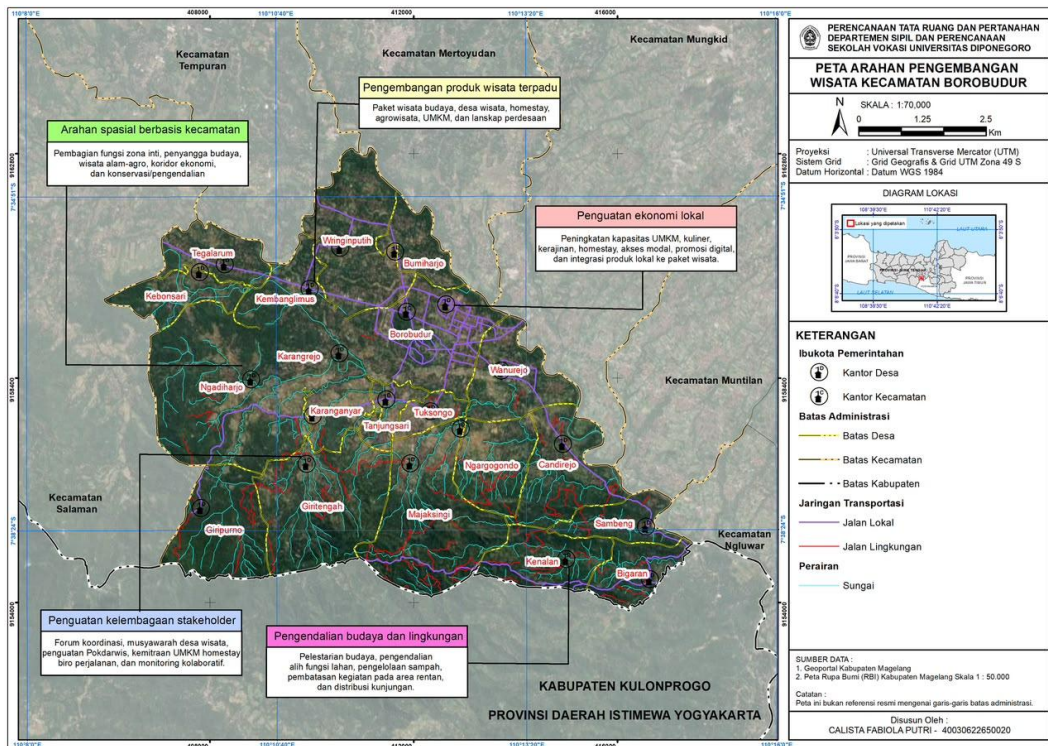
| Arahan Zona                                         | Desa/Area Arahan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fungsi Pengembangan                                                                                                                                | Arahan Pengendalian                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | dan kegiatan wisata berbasis masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
| Zona wisata alam, agrowisata, dan lanskap perdesaan | Desa Karangrejo, Ngargogondo, Majaksingi, Giritengah, Giripurno, Kenalan, Bigaran, dan Sambeng. Desa-desa ini diarahkan sebagai wilayah pengembangan wisata alam, lanskap, pertanian, kebun, tegalan, dan pengalaman perdesaan.                                                                            | Agrowisata, jalur sepeda/jalan kaki, titik pandang lanskap, edukasi pertanian, wisata alam skala kecil, dan paket pengalaman desa.                 | Pengembangan harus memperhatikan kemiringan lereng, curah hujan, risiko gerakan tanah, daya dukung lingkungan, serta tidak mendorong perubahan lahan produktif secara berlebihan.                        |
| Zona ekonomi lokal dan koridor akses wisata         | Desa Kebonsari, Tegalarum, dan Ngadiharjo, serta koridor jalan utama yang menghubungkan kawasan inti dengan desa-desa wisata. Zona ini berfungsi sebagai pendukung aktivitas perdagangan, jasa, logistik wisata, dan simpul pergerakan lokal.                                                              | Sentra UMKM, kuliner, perdagangan lokal, transportasi wisata, area informasi, titik transit, fasilitas pendukung, dan simpul distribusi wisatawan. | Perlu penataan koridor, signage, parkir, kebersihan, keselamatan jalan, serta pengaturan agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan ruang.                                  |
| Zona konservasi dan pengendalian pengembangan       | Bersifat overlay, bukan desa utuh. Area prioritas pengendalian meliputi bagian lereng/perbukitan pada Giripurno, Giritengah, Majaksingi, Kenalan, Bigaran, Sambeng, Ngargogondo, dan Karangrejo; sempadan sungai; lahan pertanian produktif; serta ruang terbuka pada seluruh desa di Kecamatan Borobudur. | Perlindungan lingkungan, pengendalian alih fungsi lahan, konservasi lanskap, edukasi lingkungan, dan wisata rendah dampak.                         | Tidak diarahkan untuk wisata intensif. Kegiatan yang diperbolehkan sebaiknya bersifat edukatif, rendah dampak, tidak merusak fungsi ekologis, serta mengikuti arahan tata ruang dan daya dukung kawasan. |

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026

Arahan spasial tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata Kecamatan Borobudur perlu dilakukan dengan pola menyebar dan terkendali. Desa Borobudur dan



Tanjungsari diarahkan sebagai zona inti dan pelayanan wisata utama. Desa Wanurejo, Candirejo, Tuksongo, Wringinputih, Karanganyar, Kembanglimus, dan Bumiharjo diarahkan sebagai zona penyangga budaya, desa wisata, UMKM, dan homestay. Desa Karangrejo, Ngargogondo, Majaksingi, Giritengah, Giripurno, Kenalan, Bigaran, dan Sambeng diarahkan sebagai zona wisata alam, agrowisata, dan lanskap perdesaan. Sementara itu, Kebonsari, Tegalarum, dan Ngadiharjo diarahkan sebagai zona ekonomi lokal dan koridor akses pendukung. Zona konservasi dan pengendalian pengembangan bersifat overlay, terutama pada area lereng, sempadan sungai, lahan pertanian produktif, dan ruang terbuka pada desa-desa yang memiliki fungsi ekologis. Dengan demikian, strategi spasial berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi lokal dan perlindungan kawasan.



**Gambar 4. 14 Peta Arahan Spasial Pengembangan Wisata Kecamatan Borobudur**

*Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2026*

#### 4.6.7 Sintesis Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat

Sintesis strategi disusun sebagai rangkuman akhir dari keseluruhan arahan pengembangan. Strategi utama yang direkomendasikan adalah pengembangan wisata

berbasis masyarakat yang mengintegrasikan daya tarik Candi Borobudur dengan potensi desa-desa di Kecamatan Borobudur. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan inti, memperluas manfaat ekonomi ke masyarakat lokal, memperkuat UMKM dan homestay, serta menjaga budaya dan lingkungan sebagai modal utama pariwisata Borobudur.

**Tabel 4. 54 Sintesis Strategi Pengembangan Pariwisata Kecamatan Borobudur Berbasis Masyarakat**

| <b>Strategi</b>                    | <b>Arahan</b>                                                                                                                           | <b>Kontribusi terhadap Penguatan Ekonomi Lokal</b>                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan produk wisata terpadu | Paket wisata budaya, desa wisata, homestay, agrowisata, UMKM, dan lanskap perdesaan.                                                    | Meningkatkan variasi atraksi dan memperpanjang lama tinggal wisatawan.                 |
| Penguatan ekonomi lokal            | Peningkatan kapasitas UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, akses modal, promosi digital, dan integrasi produk lokal ke paket wisata.     | Meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas manfaat ekonomi pariwisata.          |
| Penguatan kelembagaan stakeholder  | Forum koordinasi, musyawarah desa wisata, penguatan Pokdarwis, kemitraan UMKM-homestay-biro perjalanan, dan monitoring kolaboratif.     | Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi tumpang tindih program.             |
| Pengendalian budaya dan lingkungan | Pelestarian budaya, pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, pembatasan kegiatan pada area rentan, dan distribusi kunjungan. | Menjaga keberlanjutan kawasan dan mencegah dampak negatif pariwisata.                  |
| Arahan spasial berbasis kecamatan  | Pembagian fungsi zona inti, penyangga budaya, wisata alam-agro, koridor ekonomi, dan konservasi/pengendalian.                           | Mengarahkan pengembangan agar lebih merata, terstruktur, dan sesuai daya dukung ruang. |

*Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026*

Berdasarkan keseluruhan strategi tersebut, pengembangan pariwisata Kecamatan Borobudur berbasis masyarakat perlu diarahkan pada model pengembangan yang menghubungkan kekuatan destinasi utama dengan potensi desa-desa di Kecamatan Borobudur. Masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai aktor utama dalam penyediaan produk, jasa, atraksi, homestay, kuliner, dan pelestarian budaya. Pemerintah daerah, BOB, dan pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan

pengarah kebijakan, sedangkan Pokdarwis, UMKM, komunitas budaya, dan masyarakat menjadi pelaksana utama di tingkat lokal.

Dengan demikian, strategi pengembangan kawasan wisata tidak hanya menghasilkan peningkatan kunjungan, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pemerataan manfaat, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kelembagaan, dan pengendalian lingkungan-budaya. Strategi ini menjadi dasar bagi perumusan kesimpulan dan rekomendasi penelitian pada bab selanjutnya.